



**PEMERINTAH
KOTA SALATIGA**

LKjIP 2023

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kota Salatiga telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kota Salatiga dalam mencapai misi dan tujuan serta dalam rangka perwujudan *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kota Salatiga Tahun 2023 ini menyajikan realisasi kinerja atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023 yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Salatiga dan merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 untuk tahun yang pertama. Secara Umum realisasi kinerja Pemerintah Kota Salatiga dalam kriteria sangat baik, artinya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dialokasikan pada tahun 2023 telah berhasil, sehingga target-target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Salatiga tahun 2023. Semoga LKjIP Kota Salatiga Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Salatiga, Februari 2024
Pj. WALI KOTA SALATIGA,



YASIP KHASANI, S.IP., M.M.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun ke-1 periode RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Wali Kota yang telah dicanangkan pada tahun 2023.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 13 sasaran dengan 29 indikator kinerja utama berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga tahun 2023 disimpulkan bahwa **26** (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama atau **89,66%** dikategorikan **Sangat Baik**, dan **3** (tiga) Indikator Kinerja Utama atau **10,34%** dikategorikan **Baik**.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Rata Rata Lama Sekolah	10,67 Tahun	11,24 Tahun	105,34%	Sangat Baik
		Harapan Lama Sekolah	15,43 Tahun	15,44 Tahun	100,06%	Sangat Baik
		Indek Literasi Masyarakat	Nilai 52,06	Nilai 63,14	121,28%	Sangat Baik
2	Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	19%	32,69%	172,05%	Sangat Baik
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	15 Medali	39 Medali	260%	Sangat Baik
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	20,59%	23,23%	112,82%	Sangat Baik
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Angka Harapan Hidup	77,67 Tahun	77,93 Tahun	100,33%	Sangat Baik
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,34%	1,21%	109,7%	Sangat Baik
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	4,71%	5,34%	113,38%	Sangat Baik
		Pendapatan per kapita	54,11 Juta	54,89 Juta	101,44%	Sangat Baik
6	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan	Pertumbuhan nilai investasi	10%	52,17%	521,7%	Sangat Baik
		Tingkat pengangguran terbuka	6,76%	4,57%	132,40%	Baik



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Kategori
	Kerjasama antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,71%	72,09%	103,41%	Sangat Baik
7	Meningkatkan katahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	94,5%	94,56%	100,06%	Sangat Baik
		Pola Pangan Harapan	92,2%	92,4%	100,22%	Sangat Baik
		Persentase Peminat Transmigrasi	3,3%	25%	757,58%	Sangat Baik
8	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Score capaian KLA	Nilai 615	611	99,35%	Baik
		IDG	Nilai 80	Nilai 79,48	99,35%	Baik
		IPG	Nilai 95	Nilai 95,45	100,47%	Sangat Baik
9	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai 65,5	Nilai 64,93	99,13%	Baik
10	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	100%	100%	100%	Baik
		Penanggulangan Potensi Konflik	100%	100%	100%	Baik
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana	Nilai 3,84	Nilai 5,6	145,83%	Sangat Baik
11	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik	52,5%	58,82%	112,04%	Sangat Baik
12	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 56,2	Nilai 58,37	103,86%	Sangat Baik
		Rasio konektivitas kota	0,71%	0,81%	114,08%	Sangat Baik
		Kinerja Lalu Lintas Kota	0,35%	0,39%	111,43%	Sangat Baik
13	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan pemukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Persentase rumah yang didukung oleh PSU	10,2%	12,47%	122,25%	Sangat Baik
		Pemukiman yang tertata	6,26%	6,34%	101,28%	Sangat Baik



Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pencapaian 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama, telah dianggarkan melalui APBD Kota Salatiga sebesar Rp1.083.753.111.946,00,- dengan realisasi sebesar Rp1.014.747.383.243,00,- atau sebesar 93,63%.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Salatiga kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR GAMBAR..... viii

DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. DASAR HUKUM..... 1

 C. TUJUAN DAN MANFAAT..... 2

 1. Tujuan..... 2

 2. Manfaat 2

 D. GAMBARAN UMUM 2

 1. Aspek Geografis 2

 2. Aspek Demografis 6

 3. Aspek Pemerintahan 8

 E. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN 12

 F. SISTEMATIKA 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

 A. RENCANA STRATEGIS 15

 B. ARAH KEBIJAKAN..... 16

 1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 16

 2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 17

 C. PRIORITAS PEMBANGUNAN..... 18

 D. PERJANJIAN KINERJA..... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 25

 A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 25

 1. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas..... 27

 1.1 Rata-rata Lama Sekolah 27

 1.2 Harapan Lama Sekolah..... 31

 1.3 Indeks Literasi Masyarakat..... 35

 2. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah..... 37

 2.1 Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan..... 37

 3. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga. 41

 3.1 Peningkatan Prestasi Olahraga 41

 3.2 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 43



4. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.	46
4.1 Angka Harapan Hidup	47
4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	50
5. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	53
5.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	54
5.2 Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK)	64
6. Tujuan/Sasaran Strategis: Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.	73
6.1 Pertumbuhan Nilai Investasi.....	74
6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	76
6.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	80
7. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.	83
7.1 Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	83
7.2 Pola Pangan Harapan	86
7.3 Persentase Peminat Transmigrasi	89
8. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.	91
8.1 Skor capaian KLA	91
8.2 IDG	94
8.3 IPG	97
9. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.....	99
9.1 Indeks Reformasi Birokrasi.....	101
10. Tujuan/Sasaran Strategis: Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan.....	108
10.1 Cakupan Penanganan Ketentraman Kota.....	109
10.2 Penanggulangan Potensi Konflik	112
10.3 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	115
11. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.	118
11.1 Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik	118
12. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	122



12.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	122
12.2	Rasio Konektivitas Kota	126
12.3	Kinerja Lalu Lintas Kota	128
13.	Tujuan/Sasaran Strategis: Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.....	130
13.1	Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU	130
13.2	Pemukiman Yang Tertata.....	134
B.	REALISASI ANGGARAN	137
BAB IV	PENUTUP	140

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja**
- 2. Capaian IKU dan IKD Tahun 2023**
- 3. Cascading 2023**





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kota Salatiga.....	3
Gambar 1.2	Letak Kota Salatiga dalam Konstalasi Jawa Tengah	4





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Administratif dan Jumlah RT/RW	4
Tabel 1.2	Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	7
Tabel 1.3	Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2023	7
Tabel 1.4	Jumlah PNS Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	10
Tabel 1.5	Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2023	11
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2023	19
Tabel 3.1	Scala Ordinal Pencapaian Indikator Tujuan/Sasaran Strategis.....	26
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-Rata Lama Sekolah.....	28
Tabel 3.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah	30
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Harapan Lama Sekolah.....	31
Tabel 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah	33
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Literasi Masyarakat	35
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Literasi Masyarakat	36
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	38
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	39
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Peningkatan Prestasi Olahraga.....	41
Tabel 3.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Prestasi Olahraga.....	43
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.....	44
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	45
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Harapan Hidup.....	47
Tabel 3.15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup.....	48



Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Penduduk	51
Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk	52
Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Ekonomi	55
Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi	56
Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK)	64
Tabel 3.21 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pendapatan per kapita	65
Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Nilai Investasi	74
Tabel 3.23 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi	75
Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pengangguran Terbuka	77
Tabel 3.25 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka	78
Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	80
Tabel 3.27 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Tingkat partisipasi angkatan kerja	81
Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Penduduk Memenuhi Kriteria yang Terdata dalam DTKS	84
Tabel 3.29 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Cakupan Penduduk Memenuhi Kriteria yang Terdata dalam DTKS	85
Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pola Pangan Harapan.....	87
Tabel 3.31 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pola Pangan Harapan.....	88
Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peminat Transmigrasi.....	89
Tabel 3.33 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Persentase Peminat Transmigrasi.....	90
Tabel 3.34 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Skor capaian KLA ..	92
Tabel 3.35 Efisiensi Penggunaan Sumber daya Capaian Indikator Kinerja Skor Capaian KLA	93
Tabel 3.36 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) IDG	94
Tabel 3.37 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja IDG	96
Tabel 3.38 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) IPG	97
Tabel 3.39 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja IPG.....	98



Tabel 3.40 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Reformasi Birokrasi	101
Tabel 3.41 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	102
Tabel 3.42 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	110
Tabel 3.43 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	111
Tabel 3.44 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Penanggulangan Potensi Konflik	112
Tabel 3.45 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Penanggulangan Potensi Konflik.....	114
Tabel 3.46 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	116
Tabel 3.47 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana .	117
Tabel 3.48 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik	118
Tabel 3.49 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik	120
Tabel 3.50 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023	123
Tabel 3.51 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	124
Tabel 3.52 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rasio Konektivitas Kota	126
Tabel 3.53 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Rasio Konektivitas Kota.....	127
Tabel 3.54 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kinerja Lalu Lintas Kota	128
Tabel 3.55 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Kinerja Lalu Lintas Kota.....	129
Tabel 3.56 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU.....	131
Tabel 3.57 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU	132
Tabel 3.58 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemukiman yang tertata.....	134
Tabel 3.59 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pemukiman yang Tertata.....	135
Tabel 3.60 Perkembangan PAD Kota Salatiga Tahun 2012 - 2023.....	138
Tabel 4.1 Data Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023	140



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, demokrasi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
3. Demokrasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal itu Pemerintah Kota Salatiga harus memiliki visi dan misi serta strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai tujuan dan sasarannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sehingga dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu wujud upaya untuk mengetahui keseimbangan peran dan fungsi serta meningkatkan kinerja pemerintah adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan gambaran pada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;.



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat;
- b. Sebagai informasi kepada publik atas kinerja Pemerintah Kota Salatiga untuk memberikan saran/masukan dalam perbaikan kinerja.

2. Manfaat

Manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Salatiga;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023;
- c. Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota salatiga di masa yang akan datang.

D. GAMBARAN UMUM

1. Aspek Geografis

Kota Salatiga secara astronomis terletak antara 007°.17' dan 007°.17'.23" Lintang Selatan, dan antara 110°.27'.56,81" dan 110°.32'.4,64" Bujur Timur. Kota Salatiga memiliki ketinggian 450-825 meter di atas permukaan air laut (DPL) dengan suhu rata-rata 23°C - 28°C, sehingga menyebabkan kondisi udara menjadi sejuk.

Secara morfologi Kota Salatiga berada di daerah cekungan kaki gunung Merbabu dan dikelilingi gunung-gunung kecil antara lain adalah Gunung Gajah Mungkur, Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Keberadaan gunung-gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga menjadi subur dan memiliki potensi alam yang cukup besar.

Berdasarkan topografi, wilayah Kota Salatiga terdiri dari 3 topografi yaitu daerah bergelombang (65%), daerah miring (25%), dan daerah datar (10%).

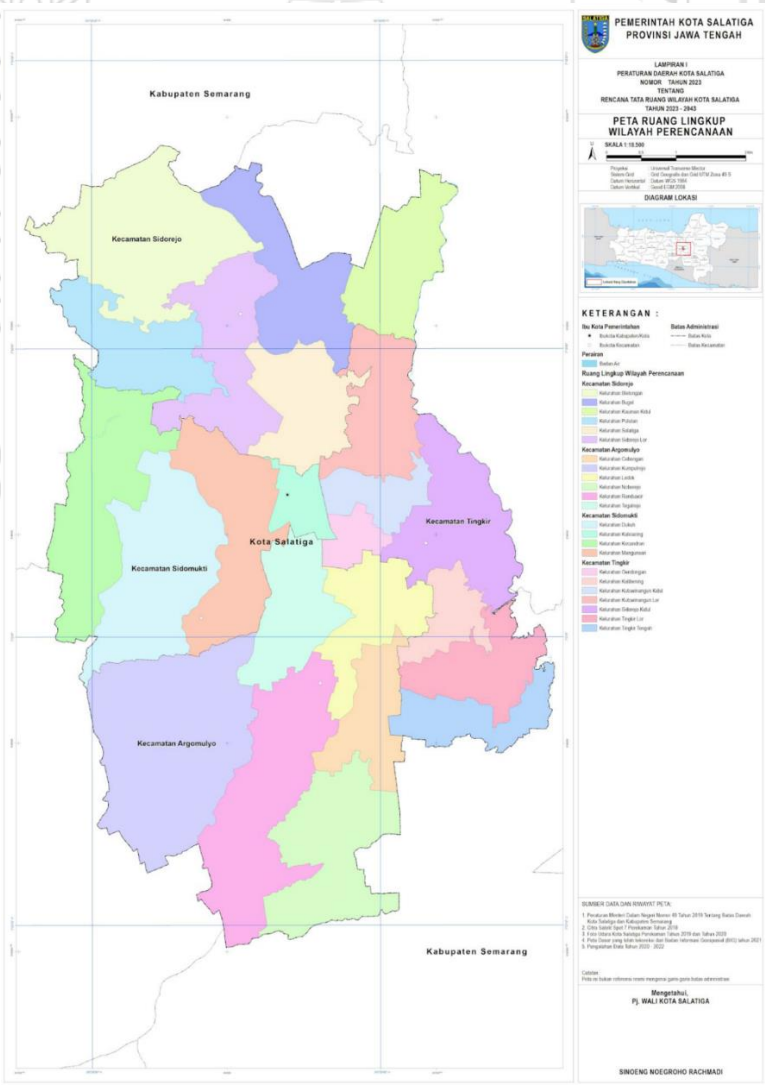


Wilayah administrasi Kota Salatiga berada ditengah-tengah Kabupaten Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan:
 - Kecamatan Pabelan : Desa Pabelan, Desa Pejanten
 - Kecamatan Tuntang : Desa Kesongo, Desa Watu Agung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan:
 - Kecamatan Pabelan : Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
 - Kecamatan Tenganan: Desa Bener, Desa Tegal Waton, Desa Nyamat
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:
 - Kecamatan Getasan : Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak
 - Kecamatan Tenganan: Desa Patemon, Desa Karang Duren
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan:
 - Kecamatan Tuntang : Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedongan
 - Kecamatan Getasan : Desa Polobogo Kecamatan Getasan.

Adapun Peta Kota Salatiga disajikan pada gambar 1.1 sebagai berikut:

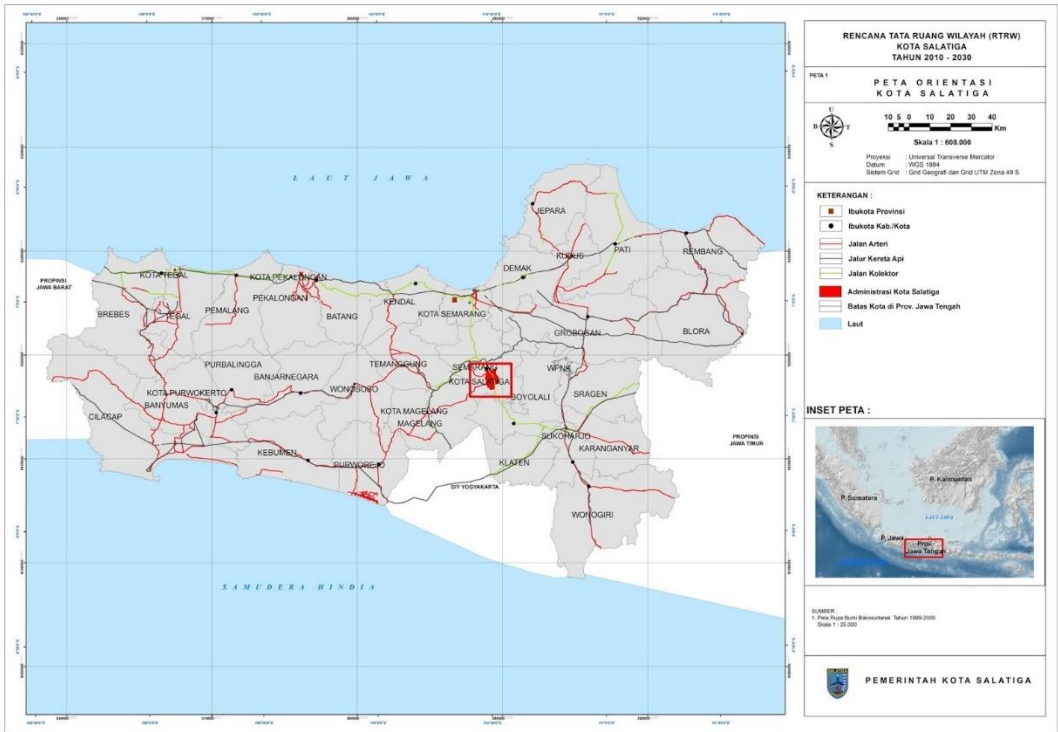
Gambar 1.1
Peta Kota Salatiga



Sumber : Dokumen RTRW Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan salah satu bagian dari 6 kota yang ada dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota Salatiga berjarak ± 53 kilometer dari Kota Surakarta dan ± 50 kilometer dari Kota Semarang, serta dilintasi jalur arteri primer (jalan nasional) Jakarta-Semarang-Surakarta. Karena menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah (Semarang-Surakarta) dan perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat, maka transportasi darat yang melalui Kota Salatiga cukup ramai. Hal ini sebagai indikasi bahwa Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah penting dan strategis di Jawa Tengah. Letak Kota Salatiga dalam konstalasi Jawa Tengah disajikan dalam gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Letak Kota Salatiga dalam Konstalasi Jawa Tengah



Sumber : Dokumen RTRW Kota Salatiga

Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2023 tercatat sebesar 5678 Ha, terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan yang terdiri dari 1.144 Rukun Tetangga (RT) dan 210 Rukun Warga (RW). Adapun rincian luas wilayah kecamatan dan kelurahan serta jumlah RT maupun RW di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Administratif dan Jumlah RT/RW

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	KECAMATAN SIDOREJO	320	62
	1. Kelurahan Blotongan	74	15
	2. Kelurahan Bugel	23	7
	3. Kelurahan Kauman Kidul	25	7
	4. Kelurahan Pulutan	20	5
	5. Kelurahan Salatiga	83	12
	6. Kelurahan Sidorejo Lor	95	16



No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
2.	KECAMATAN TINGKIR	305	49
	1. Kelurahan Gendongan	38	5
	2. Kelurahan Kalibening	9	3
	3. Kelurahan Kutowinangun Lor	91	6
	4. Kelurahan Kutowinangun Kidul	70	8
	5. Kelurahan Sidorejo Kidul	40	9
	6. Kelurahan Tingkir Lor	25	8
	7. Kelurahan Tingkir Tengah	32	10
3.	KECAMATAN SIDOMUKTI	237	40
	1. Kelurahan Dukuh	75	10
	2. Kelurahan Kalicacing	39	7
	3. Kelurahan Kecandran	27	7
	4. Kelurahan Mangunsari	96	16
4.	KECAMATAN ARGOMULYO	284	59
	1. Kelurahan Cebongan	25	6
	2. Kelurahan Kumpulrejo	44	10
	3. Kelurahan Ledok	72	14
	4. Kelurahan Noborejo	37	10
	5. Kelurahan Randuacir	43	10
	6. Kelurahan Tegalrejo	63	9
JUMLAH		1146	210

Sumber : Data Statistik Sektoral 2023

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 135.2/0012576 tentang penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah tanggal 18 September 2020, dengan telah ditetapkannya segmen batas daerah antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang maka Luas wilayah administrasi Kota Salatiga terjadi perubahan dimana luas sebelumnya 5678 Ha menjadi seluas 5498 Ha.

Kota Salatiga merupakan bagian dari kawasan Strategis Nasional Kedungsepur. Kawasan ini selain didukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki letak strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura dan secara interregional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga, pembagian struktur ruang wilayah di Kota Salatiga, masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pusat Pelayanan Kota adalah sebagai pusat pemerintahan skala kota dan perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi yang berpusat pada Kelurahan Kalicacing mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kalicacing di Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo, dan Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir.



- b. Sub Pusat Pelayanan Kota Sidorejo berfungsi sebagai kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo.
- c. Sub Pusat Pelayanan Kota Sidomukti berfungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan kesehatan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti.
- d. Sub Pusat Pelayanan Kota Argomulyo berfungsi sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, *sport centre*, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo.
- e. Sub Pusat Pelayanan Kota Tingkir berfungsi kawasan pelayanan transportasi, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir.
- f. Pusat Pelayanan Lingkungan, sebagai berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, permukiman, dan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - 1) Kecamatan Argomulyo, terdiri atas:
 - a) Kelurahan Noborejo;
 - b) Kelurahan Ledok;
 - c) Kelurahan Tegalrejo;
 - d) Kelurahan Kumpulrejo; dan
 - e) Kelurahan Cebongan.
 - 2) Kecamatan Sidomukti, terdiri atas:
 - a) Kelurahan Kecandran; dan
 - b) Kelurahan Dukuh.
 - 3) Kecamatan Sidorejo, terdiri atas:
 - a) Kelurahan Blotongan;
 - b) Kelurahan Bugel;
 - c) Kelurahan Kauman Kidul; dan
 - d) Kelurahan Pulutan.
 - 4) Kecamatan Tingkir, terdiri atas:
 - a) Kelurahan Gendongan;
 - b) Kelurahan Kalibening;
 - c) Kelurahan Tingkir Lor; dan
 - d) Kelurahan Tingkir Tengah.

2. Aspek Demografis

Jumlah penduduk di Kota Salatiga pada tahun 2023 sebanyak 201.369 jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 1.149 jiwa atau 0,57% dibandingkan tahun 2022. Jumlah penduduk laki-laki tahun 2023 adalah sebanyak 99.872 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 101.497 jiwa. Rasio jenis kelamin Kota Salatiga sebesar 98,39% atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga tahun 2018-2023 disajikan pada tabel 1.2 sebagai berikut:



Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	2018	96.490	98.121	194.611	98,34
2	2019	97.026	98.537	195.563	98,46
3	2020	97.326	98.756	196.082	98,55
4	2021	97.382	99.058	196.440	98,31
5	2022	99.403	100.817	200.220	98,60
6	2023	99.872	101.497	201.369	98,39

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2023 tertinggi terdapat di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 55.093 jiwa dan terendah terdapat di Kecamatan Sidomukti dengan jumlah penduduk 46.125 jiwa. Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga pada tahun 2023 disajikan pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2023

No	Kecamatan/Kelurahan	L	P	Jumlah
1.	KECAMATAN SIDOREJO	27.211	27.882	55.093
	1. Kelurahan Salatiga	7.167	7.385	14.552
	2. Kelurahan Bugel	1.826	1.817	3.643
	3. Kelurahan Sidorejo Lor	7.146	7.483	14.629
	4. Kelurahan Blotongan	6.568	6.576	13.144
	5. Kelurahan Pulutan	2.382	2.401	4.783
	6. Kelurahan Kauman Kidul	2.122	2.220	4.342
2.	KECAMATAN TINGKIR	23.776	24.330	48.106
	1. Kelurahan Kalibening	1.243	1.174	2.417
	2. Kelurahan Sidorejo Kidul	3.936	4.037	7.973
	3. Kelurahan Kutowinangun Lor	6.570	6.738	13.308
	4. Kelurahan Kutowinangun Kidul	4.017	4.240	8.257
	5. Kelurahan Gendongan	2.655	2.773	5.428
	6. Kelurahan Tingkir Tengah	2.775	2.749	5.524
	7. Kelurahan Tingkir Lor	2.580	2.619	5.199
3.	KECAMATAN ARGOMULYO	26.055	25.990	52.045
	1. Kelurahan Ledok	5.642	5.667	11.309
	2. Kelurahan Cebongan	2.670	2.677	5.347
	3. Kelurahan Tegalrejo	6.397	6.277	12.674
	4. Kelurahan Randuacir	3.597	3.563	7.160
	5. Kelurahan Kumpulrejo	4.302	4.320	8.622
	6. Kelurahan Noborejo	3.447	3.486	6.933
4.	KECAMATAN SIDOMUKTI	22.830	23.295	46.125
	1. Kelurahan Mangunsari	8.786	8.944	17.730
	2. Kelurahan Dukuh	7.254	7.466	14.720
	3. Kelurahan Kecandran	3.750	3.682	7.432
	4. Kelurahan Kalicacing	3.040	3.203	6.243
JUMLAH		99.872	101.497	201.369

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga



3. Aspek Pemerintahan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan berpegang pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dari suatu daerah.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan, potensi dan kemampuan daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara arif, adil dan selaras serta perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan peran tersebut daerah telah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan otonomi daerah Pemerintah Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah seperti tersebut diatas, maka susunan organisasi Pemerintah Kota Salatiga terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah Tipe B merupakan unsur staf;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur staf pendukung DPRD;
- c. Inspektorat Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
 - 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 2) Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 3) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 4) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;



- 6) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan;
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan;
 - 10) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 - 13) Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - 14) Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang kelautan dan perikanan;
 - 15) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 17) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan bidang pariwisata;
 - 18) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - 19) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi.
- e. Badan Daerah berjumlah 3 (tiga) terdiri dari:
- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - 2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang



- ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana.
- f. Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, terdiri atas:
- 1) Kecamatan Argomulyo Tipe A
 - 2) Kecamatan Sidorejo Tipe A;
 - 3) Kecamatan Tingkir Tipe A; dan
 - 4) Kecamatan Sidomukti Tipe B.
- g. Selain Perangkat Daerah sebagaimana diatas, dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan yang berjumlah 23 (dua puluh tiga).

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya aparatur yang memadai. Pada Tahun 2023 jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebanyak 3351 Orang, yang terdiri dari 1378 laki-laki dan 1973 perempuan. Selengkapny jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah PNS Kota Salatiga
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	L	P	JUMLAH
1	Inspektorat Daerah	20	17	37
2	Sekretariat Daerah	63	54	116
3	Sekeretariat DPRD	16	12	28
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19	22	41
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	15	29
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	38	26	64
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10	20	30
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	4	10
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9	13	22
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17	12	29
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13	14	27
12	Dinas Kesehatan	67	276	340
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	29	14	43
14	UPT Rumah Sakit Umum Daerah paddd Dinas Kesehatan	166	323	484
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13	9	22
16	Dinas Lingkungan Hidup	104	18	122
17	Dinas Pangan dan Pertanian	31	34	64
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33	10	43
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13	21	34
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	9	20
21	Dinas Pendidikan	390	818	1207



NO	PERANGKAT DAERAH	L	P	JUMLAH
22	Dinas Perdagangan	46	16	62
23	Dinas Perhubungan	20	12	32
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	14	11	25
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	20	32
26	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23	16	38
27	Dinas Sosial	12	20	32
28	Satuan Polisi Pamong Praja	37	8	45
29	Kecamatan Tingkir	39	39	78
30	Kecamatan Sidorejo	35	30	65
31	Kecamatan Sidomukti	22	32	54
32	Kecamatan Argomulyo	36	28	64
TOTAL		1378	1973	3351

Sumber : BKPSDM Kota Salatiga

Sedangkan komposisi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan jabatan tahun 2023 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5
Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	STRUKTURAL	PELAKSANA	FUNGSIONAL	TIDAK AKTIF	JUMLAH
1	Inspektorat Daerah	7	24	6		37
2	Sekretariat Daerah	20	48	48	1	117
3	Sekretariat DPRD	5	10	13		28
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	22	13		41
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	10	14		29
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	21	12	31		64
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6	14	10		30
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	0	5		10
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5	6	11		22
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	6	18		29
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	10	10		27
12	Dinas Kesehatan	8	271	61	3	343
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	387	87	5	489
14	UPT RSUD pada Dinas Kesehatan	7	21	15		43
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	5	12		22
16	Dinas Lingkungan Hidup	8	10	104		122
17	Dinas Pangan dan Pertanian	8	20	15		43
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	9	17		34



NO	PERANGKAT DAERAH	STRUKTURAL	PELAKSANA	FUNGSIONAL	TIDAK AKTIF	JUMLAH
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	8	9		20
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	1146	49	1	1208
21	Dinas Pendidikan	10	8	44		62
22	Dinas Perdagangan	8	9	15		32
23	Dinas Perhubungan	7	10	8		25
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6	22	4		32
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	33	23	1	65
26	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8	7	23	1	39
27	Dinas Sosial	6	14	12		32
28	Satuan Polisi Pamong Praja	12	17	16		45
29	Kecamatan Tingkir	42	6	30		78
30	Kecamatan Sidorejo	37	5	23		65
31	Kecamatan Sidomukti	28	4	22		54
32	Kecamatan Argomulyo	37	5	22		64
	TOTAL	370	2179	790	12	3351

Sumber : BKPSDM Kota Salatiga

E.ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan dirumuskan sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka pengangguran dan banyaknya penduduk miskin akibat dampak Covid-19;
2. Masih belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
3. Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan serta kesenjangan pendapatan penduduk;
4. Belum optimalnya upaya Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya penanganan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial;
5. Belum optimalnya penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah;
6. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan infrastruktur;



7. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan serta belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran tata ruang;
8. Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah.

F. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan dokumen LKjIP Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kota Salatiga tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja;
2. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
3. Lain-lain yang dianggap perlu.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan untuk perencanaan pembangunan selama tiga tahun kedepan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dituangkan ke dalam Rencana pembangunan Daerah. RPD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjabarkan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Walikota, selain itu RPD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan.

RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan RPD penjabaran dari periode ke empat dari RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah : **“SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN”** dimana dalam periode tersebut, kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk perencanaan tahun 2023-2026 adalah:

1. Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. Mendorong pemantapan perekonomian daerah yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan serta berdaya saing tinggi;
3. Pemantapan aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermanfaat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum dengan cara dilaksanakannya sistem hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan mendukung tingginya HAM;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan pembangunan dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah kota, diarahkan pada dilaksanakannya tata ruang kota yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan pemantapan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.



B. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi Pembangunan jangka menengah Kota Salatiga yang dilaksanakan melalui 13 tujuan dan 29 sasaran agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja pembangunan daerah setiap tahunnya

Tahun 2023 : Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan melalui pelayanan infrastruktur, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan

Merupakan tema pembangunan tahun pertama yang ditujukan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik yaitu melaksanakan prinsip pelibatan Partisipasi masyarakat (*Participacion*), Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of law*), Transparan (*Transparency*), peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha, Berorientasi pada consensus (*Consensus*), Kesetaraan (*Equity*), Efektifitas dan efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), Akuntabilitas (*accountability*), Visi Strtegis (*Strategic Vision*). Tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat mutlak adanya dukungan yang berkelanjutan dari masyarakat agar program-program yang dikeluarkan didukung dengan sepenuh hati oleh masyarakat. Dukungan publik merupakan kunci sukses terhadap pencapaian beragam tujuan strategis pemerintah, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang. Beberapa tujuan dari Pemerintah Kota Salatiga yang terkait dengan tema ini adalah tujuan ke-9 yang menyatakan “Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah”

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang mengamanatkan agar RKPD Tahun 2023 memuat Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Diseae 2019 (COVID-19), merencanakan program-program yang berdampak pada pemulihan perekonomian. Program-program tersebut meliputi bidang



infrastruktur, bidang Sosial, bidang ketenagakerjaan dan kesehatan. maka pada Perubahan RKPD Tahun 2023, Pemerintah Kota Salatiga.

Pengalokasian program pemulihan ekonomi ini dimaksudkan untuk upaya percepatan aktivitas perekonomian yang sempat terhenti pada saat terjadi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Percepatan pemulihan ekonomi meliputi bidang infrastruktur, perlindungan sosial, dukungan dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah serta penciptaan lapangan kerja. Namun demikian Kota Salatiga tetap mengacu pada prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan tetap memperhatikan dinamika, potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.

Perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan tata pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta



pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2023 **“MEWUJUDKAN PEMULIHAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PELAYANAN INFRASTRUKTUR, PENANGANAN STUNTING DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN”**. Merupakan tema pembangunan tahun pertama yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik yang di tahun pertama perencanaan pembangunan di Kota Salatiga. Dengan prioritas pembangunan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri kecil dan menengah untuk menciptakan daya saing
2. Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
3. Pemanfaatan Program Penanggulangan
4. Pemanfaatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing
5. Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui transformasi teknologi
6. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya



terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Berikut tabel Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2023:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Rata Rata Lama Sekolah	tahun	10,67
		Harapan Lama Sekolah	tahun	15,43
		Indek Literasi Masyarakat	Nilai	52,06
2	Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	19
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	medali	15
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	20,59
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Angka Harapan Hidup	tahun	77,67
		Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,34
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,86 - 5,44
		Pendapatan per kapita	juta	54,11
6	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi	%	10,00
		Tingkat pengangguran terbuka	%	6,46 - 5,51
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,71
7	Meningkatkan katahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	94,5
		Pola Pangan Harapan	%	92,2
		Persentase Peminat Transmigrasi	%	3,3
8	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Score capaian KLA	Nilai	615
		IDG	Nilai	80
		IPG	Nilai	95
9	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65,50
10	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
	tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Penanggulangan Potensi Konflik	%	100
		Indek Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana	%	3,84
11	Meningkatkan kualitas pentaan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik	%	52,5
12	Meningkaykan kualitas lingkungan hidup dlam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indek kualitas lingkungan Hidup	Nilai	56,2
		Rasio konektivitas kota	%	0,71
		Kinerja lalu lintas kota	%	0,35
13	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan pemukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Persentase rumah yang didukung oleh PSU	%	10,2
		Pemukiman yang tertata	%	6,26

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023 (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	688.390.539.268
2	Program Pengelolaan Pendidikan	46.107.624.126
3	Program Pengembangan Kurikulum	31.586.700
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21.426.379.988
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	39.700.800
6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	131.781.200
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	54.147.528.802
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	923.177.000
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	405.685.800
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.455.697.200
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.991.613.338
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.565.238.000
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.009.507.000
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	14.779.478.277
15	Program Penataan Bangunan Gedung	848.765.000
16	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	769.663.268
17	Program Penyelenggaraan Jalan	28.295.692.000
18	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	232.464.000
19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.350.000.000



NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023 (Rp)
20	Program Pengembangan Perumahan	739.478.000
21	Program Kawasan Permukiman	11.093.851.001
22	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	9.172.456.147
23	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.029.833.300
24	Program Penanggulangan Bencana	1.100.169.300
25	Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	784.029.100
26	Program Pemberdayaan Sosial	1.135.504.200
27	Program Rehabilitasi Sosial	1.095.296.052
28	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.361.852.000
29	Program Penanganan Bencana	55.250.000
30	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	188.957.900
31	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.196.059.200
32	Program Penempatan Tenaga Kerja	726.017.000
33	Program Hubungan Industrial	144.684.000
34	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	128.948.500
35	Program Perlindungan Perempuan	532.391.400
36	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	553.400.600
37	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	62.246.000
38	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	554.061.950
39	Program Perlindungan Khusus Anak	79.656.000
40	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	8.381.000
41	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.556.978.400
42	Program Penanganan Kerawanan Pangan	9.652.600
43	Program Pengawasan Keamanan Pangan	51.722.910
44	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.494.674.800
45	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	15.000.000
46	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	241.662.000
47	Program Penatagunaan Tanah	1.335.107.600
48	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	216.502.000
49	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	509.434.512
50	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	6.231.182.837
51	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	95.900.000
52	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	46.969.000



NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023 (Rp)
53	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	97.760.000
54	Program Pengelolaan Persampahan	3.383.323.267
55	Program Pendaftaran Penduduk	169.023.056
56	Program Pencatatan Sipil	302.488.000
57	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	95.744.000
58	Program Pengendalian Penduduk	665.582.000
59	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.514.752.000
60	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.607.959.642
61	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.978.824.266
62	Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	719.423.600
63	Program Aplikasi Informatika	4.662.178.850
64	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	48.000.000
65	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	50.000.000
66	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	263.000.000
67	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	967.850.000
68	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	614.225.000
69	Program Pengembangan UMKM	2.019.735.000
70	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	131.500.000
71	Program Promosi Penanaman Modal	259.203.000
72	Program Pelayanan Penanaman Modal	76.578.438
73	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	419.215.000
74	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	90.000.000
75	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.489.588.000
76	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16.200.001.620
77	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.562.927.000
78	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	200.619.200
79	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	212.183.300
80	Program Pengembangan Kebudayaan	995.852.600
81	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	22.425.000
82	Program Pembinaan Sejarah	294.085.400
83	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	40.000.000
84	Program Pengelolaan Permuseuman	6.000.000
85	Program Pembinaan Perpustakaan	1.401.071.900



NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023 (Rp)
86	Program Pengelolaan Arsip	561.418.200
87	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	5.000.000
88	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	763.706.000
89	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	133.467.400
90	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.413.390.400
91	Program Pemasaran Pariwisata	1.177.510.630
92	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100.000.000
93	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	623.563.700
94	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.103.353.000
95	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	358.592.000
96	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	123.158.900
97	Program Penyuluhan Pertanian	252.200.000
98	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	8.220.000
99	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.140.692.700
100	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.046.112.000
101	Program Pengembangan Ekspor	148.230.000
102	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	61.252.000
103	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.034.262.100
104	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	17.899.000
105	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industrial Nasional	17.899.000
106	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.208.810.400
107	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.118.587.700
108	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	21.722.008.500
109	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.709.084.100
110	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.293.402.200
111	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.949.652.237
112	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.708.500.000
113	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.217.456.700
114	Program Kepegawaian Daerah	1.850.461.300
115	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.674.918.000
116	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.299.330.000



NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023 (Rp)
117	Program Penyelenggaraan Pengawasan	285.462.000
118	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	803.764.100
119	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.413.973.900
120	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	26.976.634.400
121	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	405.129.000
122	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	647.489.400
123	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	885.413.100
124	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	7.734.961.964
125	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.250.912.000
126	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	158.665.500
127	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	618.294.000
JUMLAH		1.083.753.111.946



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban secara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu Pemerintah Kota Salatiga menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2023 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Salatiga (PK Perubahan Kota Salatiga) Tahun 2023.

Laporan Kinerja dilengkapi dengan Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Salatiga dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Persentase Capaian Indikator Kinerja	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
---	---	--

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya capaian kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya capaian kinerja, digunakan rumus:

Persentase Capaian Indikator Kinerja	=	$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$
---	---	--

atau dengan menggunakan rumus:



Persentase Capaian Indikator Kinerja

=

(2 x Rencana) – Realisasi

Rencana

X 100%

Selanjutnya untuk mempermudah dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan dalam penilaian kinerja pemerintah, digunakan kriteria penilaian dengan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pencapaian Indikator Tujuan/Sasaran Strategis

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	> 100%	Sangat Baik
2	75% - 100%	Baik
3	55% - 74%	Cukup
4	< 55%	Kurang

Capaian kinerja per Tujuan/Sasaran Strategis pada tahun 2023 dilakukan analisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sedangkan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya digunakan rumus sebagai mana terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

- E

:

Efisiensi
- PAKi

:

Pagu Anggaran Keluaran i
- RAKi

:

Realisasi Anggaran Keluaran i
- CKi

:

Capaian Keluaran i

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.



Hasil analisa capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis (IKU) Pemerintah Kota Salatiga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.

Tujuan/Sasaran Strategis 1 (satu) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas. terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Indeks Literasi Masyarakat.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 1 (satu) adalah Meningkatnya Kualitas dan tingkat Pendidikan Masyarakat secara luas dan Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD
 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI
 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs
 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah:

➤ **Dinas Pendidikan**

5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah:

➤ **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah serta Indeks Literasi Masyarakat tidak terlepas dari tercapainya target kinerja Indikator Kinerja Daerah pada sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat.

Perhitungan dan Pengolahan data untuk mengukur realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dilakukan oleh BPS, sedangkan Indeks Literasi Masyarakat melalui survey yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Berikut Analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah dan Indeks Literasi Masyarakat.

1.1 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang diselesaikan dalam pendidikan formal.

Untuk penghitungan indikator ini menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } i)$$

- dengan:
- P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas
- Lama sekolah penduduk ke-i =
- a. Tidak pernah sekolah = 0
 - b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
 - c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
 - d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
 - e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

Capaian kinerja pada IKU Rata-rata Lama Sekolah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	10,67	10,68	10,69	10,70	10,70
Realisasi						
Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	11,24	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Rata Rata Lama Sekolah	%	105,34	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : BPS

Indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2023 adalah sebesar 10,67 tahun dan berdasarkan data BPS terealisasi sebesar 11,24 tahun, sehingga capaian kinerja indikator Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 adalah 105,34% dengan kategori Sangat Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Realisasi kinerja untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2023 sebesar 11,24 tahun dan capaian



kinerjanya sebesar 105,34 tahun, apabila dibandingkan dengan akhir RPJMD tahun 2017-2022 sebesar 10,95 tahun artinya realisasi kinerja untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Realisasi kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 adalah sebesar 11,24 tahun, sedangkan target RPD tahun 2023 sebesar 10,70 tahun. Dengan demikian target RPD tahun pertama untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 telah tercapai.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional .

Berdasarkan data BPS, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas tahun 2023 adalah 9,13 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 adalah 8,44 tahun. Dengan demikian Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga lebih tinggi dari Rata-rata Lama Sekolah penduduk Indonesia secara nasional dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk di Provinsi Jawa Tengah.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah berpengaruh terhadap investasi pengembangan sumber daya manusia. Terdapat empat kriteria untuk investasi pengembangan sumber daya manusia yaitu (1) kebutuhan tenaga kerja terampil dalam lapangan kejuruan dan teknologi, (2) perluasan pendidikan dasar yang dipandang memiliki tingkat keuntungan/manfaat (rate of return) yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya, (3) pengembangan sektor pedesaan sehingga memperlihatkan peranan pendidikan massal untuk meningkatkan produktivitas sektor pedesaan, (4) keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan memperoleh pendidikan dan bentuk-bentuk pengembangan SDM lain baik secara geografis, social, dan ekonomis. Pendidikan menjadi salah satu aspek indikator, dengan mengukur harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di Kota Salatiga Angka Partisipasi Sekolah PAUD 96,88%, angka partisipasi SD/MI sebesar 99,30%, angka partisipasi sekolah SMP/MTs 96,80%, angka partisipasi sekolah kesetaraan 65,56%, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,041% dan angka putus sekolah SMP/MTs 0,034%. Program Pemberian Bantuan Siswa Kurang Mampu dan Program Bantuan Kualifikasi S1 untuk Guru mendukung keberhasilan peningkatan rata - rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kota Salatiga



- f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**
Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Rata-rata Lama Sekolah	105,34 %	Pengelolaan Pendidikan	46.107.621.126	44.268.661.802	96,03%	99,09%
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21.426.379.988	19.433.299.289	90,70%	99,14%
		Pengendalian Perizinan Pendidikan	39.700.800	30.950.800	77,96%	99,26%
		Pengembangan kurikulum	31.586.700	23.505.300	74,42%	99,29%
		Pengembangan Bahasa dan Sastra	131.781.200	129.172.100	98,02%	99,07%
Efisiensi						99,10%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 5 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran Rp46.107.621.126,- dan terealisasi Rp44.268.661.802,- atau sebesar 96,03%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,09%.
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran Rp21.426.379.988,- dan terealisasi Rp19.433.299.289,- atau sebesar 90,70%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,14%.
- 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan anggaran Rp39.700.800,- dan terealisasi Rp30.950.800,- atau sebesar 77,96%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,26%.
- 4) Program Pengembangan kurikulum dengan anggaran Rp31.586.700,- dan terealisasi Rp23.505.300,- atau sebesar 74,42%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,29%.
- 5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan anggaran Rp131.781.200,- dan terealisasi Rp129.172.100,- atau sebesar 98,02%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%.

Berdasarkan perhitungan di atas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah sebesar 99,10%.

- g. **Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah antara lain:

• **Dinas Pendidikan**

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, SMP dan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah.
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan yang diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan perizinan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan.
- 4) Program Pengembangan Kurikulum yang diarahkan pada Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar.
- 5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan fasilitasi, *workshop* serta apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra.

1.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Harapan Lama Sekolah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,43	15,44	15,45	15,46	15,46
Realisasi						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,44	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Harapan Lama Sekolah	%	100,06	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : BPS



Untuk penghitungan indikator ini menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

- HLSta = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
i = Usia (a, a + 1, ..., n)
FK = Faktor koreksi pesantren

Indikator kinerja Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Target indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023 sebesar 15,43 tahun dan berdasarkan data BPS terealisasi sebesar 15,44 tahun, sehingga capaian kinerja tahun 2023 adalah 100,06% dengan kategori Sangat Baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2023 sebesar 15,44 tahun dan capaian kinerjanya sebesar 100,06%. Apabila dibandingkan dengan realisasi akhir RPJMD tahun 2017-2022 sebesar 15,42 tahun, indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) terus mengalami kenaikan.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**

Realisasi indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023 adalah sebesar 15,44 tahun sedangkan Target RPD tahun 2023 adalah sebesar 15,43 tahun. Dengan demikian target RPD di tahun pertama telah tercapai

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Berdasarkan data BPS, Harapan lama Sekolah (HLS) Penduduk Indonesia sebesar 13,10 tahun. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan lamanya waktu menamatkan Pendidikan setingkat Diploma I. Sedangkan Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga adalah 15,43 tahun. Dengan demikian Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga lebih tinggi daripada Harapan Lama Sekolah Penduduk Indonesia secara nasional.



e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah berpengaruh terhadap investasi pengembangan sumber daya manusia. Terdapat empat kriteria untuk investasi pengembangan sumber daya manusia yaitu (1) kebutuhan tenaga kerja terampil dalam lapangan kejuruan dan teknologi, (2) perluasan pendidikan dasar yang dipandang memiliki tingkat keuntungan/manfaat (rate of return) yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya, (3) pengembangan sektor pedesaan sehingga memperlihatkan peranan pendidikan massal untuk meningkatkan produktivitas sektor pedesaan, (4) keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan memperoleh pendidikan dan bentuk-bentuk pengembangan SDM lain baik secara geografis, social, dan ekonomis. Pendidikan menjadi salah satu aspek indikator, dengan mengukur harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di Kota Salatiga Angka Partisipasi Sekolah PAUD 96,88%, angka partisipasi SD/MI sebesar 99,30%, angka partisipasi sekolah SMP/MTs 96,80%, angka partisipasi sekolah kesetaraan 65,56%, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,041% dan angka putus sekolah SMP/MTs 0,034%. Program Pemberian Bantuan Siswa Kurang Mampu dan Program Bantuan Kualifikasi S1 untuk Guru mendukung keberhasilan peningkatan rata - rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kota Salatiga.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Harapan Lama Sekolah	100,06 %	Pengelolaan Pendidikan	46.107.621.126	44.268.661.802	96,03%	99,04%
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21.426.379.988	19.433.299.289	90,70%	99,26%
		Pengendalian Perizinan Pendidikan	39.700.800	30.950.800	77,96%	99,09%
		Pengembangan Kurikulum	31.586.700	23.505.300	74,42%	99,22%
		Pengembangan Bahasa dan Sastra	131.781.200	129.172.100	98,02%	99,02%
Efisiensi						99,06%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 5 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah yaitu:



- 1) Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran Rp46.107.621.126,- dan terealisasi Rp44.268.661.802,- atau sebesar 96,01%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%.
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran Rp21.426.379.988,- dan terealisasi Rp19.433.299.289,- atau sebesar 90,70%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,09%.
- 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan anggaran Rp39.700.800,- dan terealisasi Rp30.950.800,- atau sebesar 77,96%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,22%.
- 4) Program Pengembangan kurikulum dengan anggaran Rp31.586.700,- dan terealisasi Rp23.505.300,- atau sebesar 74,42%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,26%.
- 5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan anggaran Rp131.781.200,- dan terealisasi Rp129.172.100,- atau sebesar 98,02%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.

Berdasarkan perhitungan di atas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah sebesar 99,06%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah antara lain:

• **Dinas Pendidikan**

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah.
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan yang diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan perizinan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan.

- 4)

Program Pengembangan Kurikulum yang diarahkan pada Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar.
- 5)

Program Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan fasilitasi, workshop serta apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra.

1.3 Indeks Literasi Masyarakat

Indek literasi masyarakat diukur dari kemampuan:

- Membaca
- Bicara
- Menulis
- Memahami bacaan
- Eksplorasi pengetahuan
- Trnasformasi menjadi pengetahuan
- Transformasi menjadi produk/jasa

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Literasi Masyarakat tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Literasi Masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	52,06	52,56	52,76	53,26	53,26
Realisasi						
Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	63,14	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Indeks Literasi Masyarakat	%	121,28	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Indikator kinerja Indeks Literasi Masyarakat merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Literasi Masyarakat tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Target indikator kinerja Indeks Literasi Masyarakat tahun 2023 sebesar 52,06 (nilai) dan terealisasi sebesar 63,14 berdasarkan survey terhadap masyarakat Kota Salatiga. Sehingga capaian kinerja tahun 2023 adalah 121,28% dengan kategori Sangat Baik.
- b.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Realisasi kinerja Indeks Literasi Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 63,14 dan capaian kinerja sebesar 121,28%



- untuk indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru pada RPD tahun 2023-2026.
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**
Realisasi indikator kinerja Indeks Literasi Masyarakat tahun 2023 adalah sebesar 63,14 sedangkan Target akhir RPD tahun 2026 adalah sebesar 53,26. Dengan demikian target RPD untuk indikator kinerja Indeks Literasi Masyarakat telah tercapai di tahun pertama.
- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
Tidak ada standar nasional untuk indikator Indeks Literasi Masyarakat.
- e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**
Faktor penyebab keberhasilan:
1) Perkembangan literasi masyarakat bergantung pada kegemaran membaca dimana nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Salatiga realisasi sebesar 96,08 termasuk kategori sedang.
2) Upaya yang dilaksanakan diantaranya
 - Menyediakan bahan bacaan bagi masuarakat dan meningkatkan motivasi membaca dari masyarakat
 - Meningkatkan kempuan masyarakat dalam menyampaikan informasi melalui pelatihan-pelatihan, *talkshow*/bincang santai dan lomba *resume*
 - Peningkatan Kerjasama dengan mitra atau organisasi profesi dalam penulisan jurnal
 - Meningkatkan kemampuan wirausaha masyarakat meelalui literasi
- f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**
Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Literasi Masyarakat

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indeks Literasi Masyarakat	178,85 %	Pembinaan perpustakaan	1.401.071.900	1.301.851.365	92,92%	99,48%
Efisiensi						99,48%

Sumber : Data yang diolah

- Terdapat 1 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Literasi Masyarakat yaitu:
- 1) Program Pembinaan perpustakaan dengan anggaran Rp 1.401.071.900,- dan terealisasi Rp 1.301.851.369,- atau



sebesar 92,92%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,48%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Literasi Masyarakat sebesar 99,48%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Literasi Masyarakat antara lain:

• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program nilai tingkat kegemaran membaca.

2. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah.

Tujuan/Sasaran Strategis 2 (dua) meningkatkan Apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah hanya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 2 (satu) adalah Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah dengan variabel indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

- 1. Persentase obyek pemajuan yang dilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan
 - 2. Persentase cagar budaya yang dilestarikan
- Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 2 (dua) adalah:

➤ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.1 Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan

Untuk menghitung realisasi kinerja pada indikator cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan digunakan rumus sebagai berikut:

<i>Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan</i>	$= \frac{\text{Jumlah cahar budaya,sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah seluruh cagar budaya sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang ditata}}$	$X 100\%$
---	--	-----------

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan
Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	%	19	30	41	52	52
Realisasi						
Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	%	32,69	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	%	172,05	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Indikator kinerja Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan Tahun 2023 sebesar 19% dan terealisasi sebesar 32,69%, sehingga capaian indikator kinerja adalah 172,05% dengan kategori Sangat Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Realisasi kinerja untuk Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan pada tahun 2023 sebesar 32,69% dan capaian kinerjanya sebesar 172,05%. Untuk indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan ini merupakan indikator baru pada RPD tahun 2023-2026.
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**



Realisasi kinerja Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan tahun 2023 sebesar 32,69% sedangkan target dalam RPD tahun 2023 sebesar 19% dan target akhir RPD tahun 2026 adalah 53,26%. Dengan demikian di tahun pertama indikator ini telah tercapai.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan tercapainya target dari indikator ini adalah:

- 1) Tingginya animo/partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap seni budaya daerah.
- 2) Kerjasama dan koordinasi yang maksimal dengan pemerhati seni budaya, pemerhati cagar budaya dan sejarawan, sekolah/ perguruan tinggi, pelaku pariwisata, masyarakat, OPD/Instansi terkait dan stakeholder dalam menyelenggarakan dan mengembangkanserta mempromosikan obyek pemajuan budaya salatiga serta lekasnakan pembinaan dan pelestarian cagar budaya secara berkala.
- 3) Banyaknya potensi benda cagar budaya dan peninggalan sejarah di Kota Salatiga.
- 4) Edukasi masyarakat dan sekolah tentang objek pemajuan budaya melalui lomba seni budaya dan berbagai pentas/event pagelaran seni serta edukasi cagar budaya melalui sosialisasi hasil kajian cagar budaya dan lomba-lomba tentang cagar budaya.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi,	121,28%	Pengembangan Kebudayaan	995.852.600	992.902.200	99,70%	99,42%
		Pengembangan Kesenian Tradisonal	22.425.000	22.425.000	100%	99,42%
		Pembinaan Sejarah	294.085.400	289.794.900	98,54%	99,43%



Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
dikembangkan dan dimanfaatkan		Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	40.000.000	39.994.200	99,99%	99,42%
		Pengelolaan Permuseuman	6.000.000	5.997.100	99,95%	99,42
Efisiensi						99,42%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 5 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan yaitu:

- 1) Program Pengembangan kebudayaan dengan anggaran Rp 995.852.600,- dan terealisasi Rp 992.902.200,- atau sebesar 99,70%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,42%.
- 2) Program Pengembangan kesenian tradisonal dengan anggaran Rp22.425.000,- dan terealisasi Rp22.425.000,- atau sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,42%.
- 3) Program Pembinaan Sejarah dengan anggaran Rp294.085.400,- dan terealisasi Rp289.794.900,- atau sebesar 98,54%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,43%.
- 4) Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan anggaran Rp40.000.000,- dan terealisasi Rp39.994.200,- atau sebesar 99,99%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,42%.
- 5) Program Pengelolaan permuseuman melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan anggaran Rp6.000.000,- dan terealisasi Rp5.997.100,- atau sebesar 99,95%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,42%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar 99,42%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - 1) Program Pengembangan Kebudayaan yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan

- capaian program persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan.
- 2) Program Pengembangan kesenian tradisonal yang diarahkan pada kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Persentase SDM, Lembaga dan pranata yang dibina.
 - 3) Program Pembinaan Sejarah yang diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase kajian sejarah.
 - 4) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Persentase penetapan cagar budaya.
 - 5) Program Pengelolaan Permuseuman yang diarahkan sasaran kegiatan pengelolaan museum kota.

3. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga.

Tujuan/Sasaran Strategis 3 (tiga) Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Peningkatan prestasi olahraga dan Tingkat peratisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 3 (tiga) adalah Meningkatnya Prestasi dalam Olahraga dan Meningkatnya partisipasi pemuda dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Cakupan pembinaan Olahraga
2. Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
3. Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 3 (tiga) adalah:

➤ Dinas Kepemudaan dan Olahraga

3.1 Peningkatan Prestasi Olahraga

Indikator Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan perhitungan dari jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional.

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) Peningkatan prestasi olahraga:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Peningkatan Prestasi Olahraga

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Medali	15	30	16	16	16
Realisasi						
Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Medali	39	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Capaian Kinerja						
Peningkatan prestasi olahraga	%	260	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Indikator kinerja Peningkatan prestasi olahraga merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Peningkatan prestasi olahraga tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Target Peningkatan prestasi olahraga tahun 2023 adalah 15 medali sedangkan realisasi adalah 39 medali sehingga capaian kinerja 260% dengan kategori Sangat Baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi Peningkatan prestasi olahraga tahun 2023 adalah 39 medali dan capaian kinerjanya sebesar 260% indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**

Realisasi kinerja Peningkatan prestasi olahraga tahun 2023 adalah 39 medali sedangkan target pada RPD tahun 2023 adalah 15 medali sehingga realisasi indikator Peningkatan prestasi olahraga di tahun pertama sudah tercapai

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Tidak ada standar nasional dalam indikator Peningkatan prestasi olahraga.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan untuk indikator ini Pemerintah Kota Salatiga melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan olah-raga yang berjenjang mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas.
- 2) Mengintensifkan event-event olahraga untuk mendapatkan potensi baru dalam bidang olahraga.
- 3) Meningkatkan keikutsertaan atlet-atlet lokal pada berbagai event olahrag baik di level lokal antar daerah maupun internasional.



- 4) Mengembangkan dan memperbaiki sarana dan prasarana olahraga dilingkungan masyarakat, baik di level kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Prestasi Olahraga

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Peningkatan prestasi olahraga	260	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16.200.001.620	15.461.267.000	95,44%	99,63%
Efisiensi						99,63%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 1 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan yaitu:

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan anggaran Rp16.200.001.620,- dan terealisasi Rp15.461.267.000,- atau sebesar 95,44%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,63%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Peningkatan prestasi olahraga sebesar 99,63%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya mendukung indikator ini program/kegiatan yang mendukung antara lain sebagai berikut:

• Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, penyelenggaraan kejuaran olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

3.2 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Indikator ini dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\% \right)$$

2



Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri,
Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	20,59	2,59	21	21	21
Realisasi						
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	23,23	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	112,82	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Indikator kinerja Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2023 adalah 20,59% dan terealisasi sebesar 23,23% sehingga capaian kinerjanya sebesar 112,82% dengan kategori Sangat Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Realisasi Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2023 adalah 23,23% dan capaiannya sebesar 112,82% indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.



c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**

Realisasi kinerja Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2023 adalah 23,23% sedangkan target pada akhir RPD tahun 2026 adalah 21% sehingga indikator ini sudah memenuhi target di tahun pertama RPD.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Tidak ada standar nasional dalam indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan untuk indikator ini, Pemerintah Kota Salatiga melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan potensi pemuda dalam berbagai kegiatan Pendidikan ketrampilan dan pelatihan khususnya dalam bidang kewirausahaan
- 2) Meningkatkan ketertiban pemuda (melalui organisasi kepemudaan) dalam berbagai kegiatan/event yang diselenggarakan baik oleh pemerintah di level masyarakat

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.13

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	112,82%	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.489.588.000	1.461.438.200	98,11%	99,13%
		Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.562.927.000	1.511.463.800	96,71%	99,14%
Efisiensi						99,14%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 2 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan yaitu:



- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan anggaran Rp1.489.588.000,- dan terealisasi Rp1.461.438.200,- atau sebesar 98,11%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,13%.
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan anggaran Rp 1.562.927.000,- dan terealisasi Rp 1.511.463.800,- atau sebesar 98,71%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,14%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 99,14%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya mendukung indikator ini program/kegiatan yang mendukung antara lain sebagai berikut:

• Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan capaian program Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

4. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.

Tujuan/Sasaran Strategis 4 (empat) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Angka Harapan Hidup dan Laju Pertumbuhan Penduduk.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 4 (empat) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup adalah:

1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
 - a. Angka Kematian Ibu;
 - b. Angka Kematian Bayi;
 - c. Prevalensi Balita Gizi Buruk;

- d. Sukses Rate TB;
- e. Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia diatas 15 tahun.
2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
- a. Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama;
- b. Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Dinas Kesehatan**

4.1 Angka Harapan Hidup

Definisi Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Angka Harapan Hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan nilai pola mortalitas menurut umur. Perhitungan Angka Harapan Hidup dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Harapan Hidup:

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Angka Harapan Hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Angka Harapan Hidup	Tahun	77,67	77,78	77,89	77,98	77,98
Realisasi						
Angka Harapan Hidup	Tahun	77,93	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Angka Harapan Hidup	%	100,33	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : BPS

Indikator kinerja angka harapan hidup merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Harapan Hidup tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisa sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
- Target tahun 2023 Angka harapan hidup sebesar 77,67 tahun dan terealisasi 77,93 tahun. Sehingga capaian indikator kinerja Angka Harapan Hidup tahun 2023 sebesar 100,33% dengan kategori Sangat Baik.



b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi indikator kinerja Angka Harapan Hidup pada tahun 2023 adalah 77,93 tahun dan capaiannya adalah 100,33%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 77,55 tahun, dan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 77,72 tahun, realisasi dan capaian indikator kinerja Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan setiap tahun.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**

Realisasi kinerja indikator kinerja Angka Harapan Hidup tahun 2023 adalah 77,93 tahun, sedangkan target RPD tahun 2023 sebesar 77,67 tahun dan target akhir RPD 2026 sebesar 77,98 tahun. Dengan demikian target RPD tahun pertama telah tercapai sesuai terget yang ditetapkan.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Berdasarkan data BPS tahun 2023, angka harapan hidup di Indonesia mencapai 71,85 tahun, sedangkan di Kota Salatiga Angka Harapan Hidup sudah mencapai 77,93 tahun, dengan demikian Angka Harapan Hidup penduduk Kota Salatiga lebih tinggi daripada Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Penyebab keberhasilan tercapainya target dari indikator ini adalah:

- 1) Faktor-faktor yang komplek untuk mempengaruhi yaitu sosial, ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, lingkungan dan budaya.
- 2) Meningkatnya Kesehatan dan keselamatan ibu dan anak.
- 3) Menurunnya penyakit menular, tidak menular dan bencana menyebabkan naiknya angka harapan hidup.

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja
Angka Harapan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Angka Harapan Hidup	100,33%	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	54.147.528.802	48.670.972.979	89,89%	99,10%



Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	923.177.000	731.312.700	79,22%	99,21%
		Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	405.685.800	373.650.650	92,10%	99,08%
		Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	3.455.697.200	3.433.037.566	99,34%	99,01%
Efisiensi						99,10%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 4 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup yaitu:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp54.147.528.802,- dan terealisasi Rp48.670.972.979,- atau sebesar 89,89%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,10%.
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan anggaran Rp 923.177.000,- dan terealisasi Rp 731.312.700,- atau sebesar 79,22%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,21%.
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan anggaran Rp405.685.800,- dan terealisasi Rp373.650.650,- atau sebesar 92,10%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,08%.
- 4) Program Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan anggaran Rp3.455.697.200,- dan terealisasi Rp3.433.037.566,- atau sebesar 99,34%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Harapan Hidup sebesar 99,10%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Angka Usia Harapan Hidup, di dukung oleh program sebagai berikut:

- **Dinas Kesehatan**
 - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang diarahkan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara



- terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota.
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota.
 - 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) penerbitan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
 - 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang diarahkan pada kegiatan dengan sasaran kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral tingkat Kota dan pelaksanaan kesehatan dalam rangka promotif preventif tingkat Kota.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 4 (empat) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Penduduk adalah terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) TFR (*Total Fertility Rate*) Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

- **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana**

4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Definisi Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk dilaksanakan oleh BPS dengan formulasi sebagai berikut :

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$$

Metode geometri

r : Laju pertumbuhan penduduk

P_t : Jumlah penduduk tahun t

P₀ : Jumlah penduduk tahun awal

t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Penduduk:



Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,34	1,32	1,30	1,30	1,30
Realisasi						
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,21	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	109,70	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : BPS

Indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisa sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2023 sebesar 1,34% dan terealisasi 1,21%, sehingga capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga tahun 2023 sebesar 109,70% dengan kategori Sangat Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**
Realisasi kinerja indikator Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun tahun 2023 sebesar 1,21% dan capaiannya sebesar 90,30% sedangkan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 0,83%, dan akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 0,80% bisa diartikan realisasi kinerja indikator Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2023 mengalami kenaikan.
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**
Realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2023 adalah sebesar 1,21%, dan target RPD tahun 2023 sebesar 1,34% sedangkan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 1,30%. Dengan demikian target akhir RPD untuk indikator Laju Pertumbuhan Penduduk telah tercapai pada tahun 2023.
- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 1,13%. Dengan demikian Laju

Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga yang sebesar 1,21% masih lebih tinggi dibanding Laju Pertumbuhan Penduduk di seluruh Indonesia.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk antara lain Kelahiran (fertilitas), Kematian (mortalitas), Perpindahan (migrasi). Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Salatiga hanya bisa menjalankan pada pengaturan jumlah kelahiran melalui program KB dan pelayanan KB,

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator antara lain:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan
- 2) Meningkatkan kesadaran yang baik pada remaja tentang Kesehatan reproduksi
- 3) Peningkatan layanan keluarga berencana.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Laju Pertumbuhan Penduduk	109,70%	Pengendalian Penduduk	665.582.000	626.078.700	94,06%	99,14%
		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.514.752.000	3.182.374.786	90,54%	99,17%
		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.607.959.642	1.582.232.100	98,40%	99,10%
Efisiensi						99,15%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk yaitu:

- 1) Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran Rp.665.582.000,- dan terealisasi Rp.626.078.700,- atau sebesar 94,06%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,14%.
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran Rp.3.514.752.000,- dan terealisasi Rp.3.182.374.786,- atau sebesar 90,54%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,17%.



- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan anggaran Rp.1.607.959.642,- dan terealisasi Rp.1.582.232.100,- atau sebesar 99,40%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,10%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 99,15%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Laju Pertumbuhan Penduduk, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung antara lain sebagai berikut:

• Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

- 1) Program Pengendalian Penduduk yang diarahkan pada kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh dan petugas lapangan KB, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB.
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan peningkatan organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga.

5. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.

Tujuan/Sasaran strategis 5 (lima) Menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per kapita.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 5 (lima) adalah

1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif dengan (IKD) Persentase koperasi aktif:
2. Meningkatnya jumlah UKM dengan (IKD) Persentase Usaha Mikro dan Kecil.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ Dinkop Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



3. Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kuantitas dan kualitas dengan IKD:

- a. Persentase pertumbuhan IKM (industri kecil menengah);
- b. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

4. Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja dengan IKD Tingkat Produktivitas tenaga Kerja

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

5. Meningkatnya pendapatan daerah dengan IKD Persentase Peningkatan PAD terhadap pendapatan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

6. Meningkatnya kinerja perdagangan dengan IKD Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Dinas Perdagangan**

7. Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan dengan IKD

- a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara;
- b. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara;
- c. Tingkat hunian akomodasi;
- d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku;
- e. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

8. Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat dengan IKD

- a. Produktivitas padi;
- b. Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura;
- c. Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi;
- d. Produktivitas Sapi perah;
- e. Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi);
- f. Peningkatan produksi perikanan (benih);
- g. Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis;
- h. Ketersediaan beras.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Dinas Pangan dan Pertanian**

5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam produksi barang dan jasa secara keseluruhan dalam suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pertumbuhan ekonomi dilaksanakan oleh BPS dengan formulasi sebagai berikut :

$$Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_t}{PDRB_t} \times 100\%$$

Dimana:
t+1 = tahun pengamatan PDRB
t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya

Berikut tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Ekonomi:

Tabel 3.18

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,71	4,84	4,90	5,00	5,00
Realisasi						
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Pertumbuhan Ekonomi	%	113,38	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : BPS

Indikator Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Target Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 sebesar 4,71% dan terealisasi sebesar 5,34% sehingga capaian kinerja adalah 113,38% dengan kategori Sangat Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**

Realisasi kinerja untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 sebesar 5,34% dan capaian kinerja sebesar 113,38%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 3,33%, dan tahun 2022 sebesar 5,53%, Pertumbuhan Ekonomi di Kota Salatiga yang sempat naik di tahun 2022, mengalami penurunan di tahun 2023.
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**

Realisasi kinerja Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 sebesar 5,34% sedangkan target RPD tahun 2023 sebesar 4,71% dan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 5%, dengan demikian pada tahun pertama RPD telah tercapai melebihi target yang



- ditentukan.
- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada 2023 tercatat sebesar 5,34% masih lebih tinggi dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,98% dan Pertumbuhan Ekonomi nasional sebesar 5,05%.
- e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah:
- 1) Kondisi sosial yang stabil dan kualitas hidup yang tinggi dapat menciptakan lingkungan yang menarik bagi penduduk dan pengusaha untuk tinggal dan berinvestasi.
 - 2) Mendorong inovasi dan kewirausahaan sehingga menciptakan lapangan kerja, produk dan layanan baru, serta meningkatkan daya saing.
 - 3) Kemitraan yang kuat antara pemerintah kota, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah sehingga memobilisasi investasi dan sumber daya yang diperlukan.
 - 4) Kebijakan atau regulasi yang mendukung investasi, inovasi, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi.
- f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**
Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Pertumbuhan Ekonomi	113,38 %	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	48.000.000	47.967.550	99,93%	99,12%
		Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi	50.000.000	50.000.000	100 %	99,12%
		Pendidikan dan Latihan perkoperasian	263.000.000	259.422.300	98,64%	99,13%
		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	697.850.000	687.731.450	98,55%	99,13%
		Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dann usaha mikro	614.225.000	597.395.400	97,26%	99,14%
		Pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	2.019.735.000	1.964.259.000	99,89%	99,12%
		Hubungan industrial	144.684.200	144.530.000	90,17%	99,20%
		Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.196.059.200	1.980.188.686	53,38%	99,53%
		Penempatan tenaga kerja	726.017.000	387.556.500	73,14%	99,35%



Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Pengelolaan keuangan daerah	3.949.652.237	1.186.069.890	81,94%	99,28%
		Pengelolaan barang milik daerah	1.708.500.000	1.399.973.657	93,27%	99,18%
		Pengelolaan pendapatan daerah	2.217.456.700	2.068.138.250	99,80%	99,12%
		Perizinan dan pendaftaran perusahaan	8.220.000	8.203.500	94,34%	99,17%
		Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	4.140.692.700	3.906.477.198	4,38%	99,96%
		Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1.046.112.000	45.835.250	95,89%	99,15%
		Pengembangan ekspor	148.230.000	142.135.000	51,15%	99,55%
		Standarisasi dan perlindungan konsumen	61.252.000	31.331.500	90,95%	99,20%
		Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	2.413.390.400	2.195.009.825	90,38%	99,20%
		Pemasaran pariwisata	1.177.510.630	1.064.201.000	97,98%	99,14%
		Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	100.000.000	97.980.000	97,55%	99,14%
		Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	623.563.700	608.267.900	96,39%	99,15%
		Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.103.353.000	1.817.271.750	86,40%	99,24%
		Penyuluhan pertanian	252.200.000	239.208.700	94,85%	99,16%
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	123.158.900	121.059.000	98,29%	99,13%
		Pengelolaan perikanan budidaya	763.706.000	758.371.050	99,30%	99,12%
		Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	133.467.400	130.015.300	97,41%	99,14%
		Penegndalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner	358.592.000	323.695.800	90,27%	99,20%
		Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	8.381.000	8.180.000	97,60%	99,14%
		Pengawasan keamanan pangan	51.722.910	49.045.300	94,82%	99,16%
		Penanganan kerawanan pangan	9.652.600	6.812.000	70,57%	99,38%
Efisiensi						99,24%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 30 program untuk mendukung capaian Pertumbuhan Ekonomi yaitu:



- 1) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan anggaran Rp48.000.000,- dan terealisasi Rp47.967.550,- atau sebesar 99,93% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,12%
- 2) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi dengan anggaran Rp50.000.000,- dan terealisasi Rp50.000.000,- atau sebesar 100,00% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,12%
- 3) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran Rp263.000.000,- dan terealisasi Rp259.422.300,- atau sebesar 98,64% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,13%
- 4) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran Rp697.850.000,- dan terealisasi Rp687.731.450,- atau sebesar 98,55% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,13%
- 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh) dengan anggaran Rp614.225.000,- dan terealisasi Rp597.395.400,- atau sebesar 97,26% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,14%
- 6) Program Hubungan Industrial dengan anggaran Rp144.684.200,- dan terealisasi Rp144.530.000,- atau sebesar 99,89% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,12%
- 7) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran Rp2.196.059.200,- dan terealisasi Rp1.980.188.686,- atau sebesar 90,17% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,20%
- 8) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran Rp726.017.000,- dan terealisasi Rp387.556.500,- atau sebesar 53,38% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,53%
- 9) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran Rp3.949.652.237,- dan terealisasi Rp2.888.610.127,- atau sebesar 73,14% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,35%
- 10) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran Rp1.708.500.000,- dan terealisasi Rp1.399.973.657,- atau sebesar 81,94% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,28%
- 11) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran Rp2.217.456.700,- dan terealisasi Rp2.068.139.250,- atau sebesar 93,27% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,18%
- 12) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan anggaran Rp8.220.000,- dan terealisasi Rp8.203.500,- atau sebesar 99,80% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,12%
- 13) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran Rp4.140.692.700,- dan terealisasi Rp3.906.477.198,- atau sebesar 94,34% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,17%



- 14) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan anggaran Rp1.046.112.000,- dan terealisasi Rp45.835.250,- atau sebesar 4,38% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,96%
- 15) Program Pengembangan Ekspor dengan anggaran Rp148.230.000,- dan terealisasi Rp142.135.000,- atau sebesar 95,89% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,15%
- 16) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran Rp61.252.000,- dan terealisasi Rp31.331.500,- atau sebesar 51,15% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,55%
- 17) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan anggaran Rp2.413.390.400,- dan terealisasi Rp2.195.009.825,- atau sebesar 90,95% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,20%
- 18) Program Pemasaran Pariwisata dengan anggaran Rp1.177.510.630,- dan terealisasi Rp1.064.201.000,- atau sebesar 90,38% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,20%
- 19) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan anggaran Rp100.000.000,- dan terealisasi Rp97.980.000,- atau sebesar 97,98% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,14%
- 20) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan anggaran Rp623.563.700,- dan terealisasi Rp608.267.900,- atau sebesar 97,55% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,14%
- 21) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran Rp3.494.674.800,- dan terealisasi Rp3.368.471.747,- atau sebesar 96,39% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,15%
- 22) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran Rp2.103.353.000,- dan terealisasi Rp1.817.271.750,- atau sebesar 86,40% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,24%
- 23) Program Penyuluhan Pertanian dengan anggaran Rp252.200.000,- dan terealisasi Rp239.208.700,- atau sebesar 94,85% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,16%
- 24) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan anggaran Rp123.158.900,- dan terealisasi Rp121.059.000,- atau sebesar 98,29% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,13%
- 25) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan anggaran Rp763.706.000,- dan terealisasi Rp758.371.050,- atau sebesar 99,30% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,12%



- 26) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran Rp133.467.400,- dan terealisasi Rp130.015.300,- atau sebesar 97,41% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,14%
- 27) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan anggaran Rp358.592.000,- dan terealisasi Rp323.695.800,- atau sebesar 90,27% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,20%
- 28) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan dengan anggaran Rp8.381.000,- dan terealisasi Rp8.180.000,- atau sebesar 97,60% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,14%
- 29) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan anggaran Rp51.722.910,- dan terealisasi Rp49.045.300,- atau sebesar 94,82% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,16%
- 30) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan anggaran Rp9.652.600,- dan terealisasi Rp6.812.000,- atau sebesar 70,57% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,38%

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Pertumbuhan Ekonomi sebesar 99,24%.

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator sasaran ini adalah:

• **Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

- 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase koperasi yang berkualitas.
- 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase KSP/USP koperasi sehat, dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian.
- 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan.
- 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan



perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi.

- 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yang iarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan.

- **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan swasta.
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan sasaran pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah.
- 3) Program Hubungan Industrial dengan sasaran kegiatan pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

- **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran kegiatan pengelolaan barang milik daerah untuk mencapai indikator kinerja program Asset Management.
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dengan capaian program Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

- **Dinas Perdagangan**

- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan sasaran kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari



waralaba dalam negeri, dan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.

- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan sasaran kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.
- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan sasaran kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar serta pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah.
- 4) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan sasaran kegiatan pelaksanaan metrologo legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- 5) Program Pemasaran ekspor dengan sasaran kegiatan pelaksanaan promosi melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan.

• **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan capaian program jumlah objek wisata.
- 2) Program Pemasaran Pariwisata yang diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan capaian program jumlah kegiatan/fasilitas pemasaran pariwisata.
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif dengan capaian program Jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif.
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dengan capaian program jumlah peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

• **Dinas Pangan dan Pertanian**

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan untuk mencapai target kinerja penyediaan infrastruktur pangan.
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan yang diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan



- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai target indikator kinerja penanganan rumah tangga rawan pangan.
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk mencapai target pangan segar.
 - 4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program capaian bina kelompok pembudidaya ikan dan presentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
 - 5) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang diarahkan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dengan capaian program cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan dan presentase kelompok kelompok pengelola dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
 - 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota, peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain, dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan sarana pertanian,
 - 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan prasarana pertanian.
 - 8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan capaian program jumlah kejadian bencana pertanian.
 - 9) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan Penerapan dan

- Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan dengan capaian program Mortalitas Hewan/ternak akibat penyakit zoonosis.
- 10) Program Penyuluhan Pertanian yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan capaian program Cakupan Bina Kelompok Tani untuk Pemula, Lanjut, Madya dan Utama.

5.2 Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK)

Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK) mengukur nilai produksi barang dan jasa di suatu daerah dalam satu periode waktu tertentu (biasanya satu tahun) dengan menggunakan harga tahun dasar yang tetap atau konstan. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK) dilaksanakan oleh BPS dengan formulasi sebagai berikut :

$$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB}{\sum penduduk} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pendapatan per kapita

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK)

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Pendapatan per kapita	Juta	54,11	55,80	57,48	59,16	59,16
Realisasi						
Pendapatan per kapita	Juta	54,89*	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Pendapatan per kapita	%	101,44	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

* Angka Sangat Sementara Sumber : BPS

Indikator Pendapatan per kapita merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Pendapatan per kapita tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target Pendapatan per kapita tahun 2023 sebesar 54,11 juta dan terealisasi sebesar 54,89 juta, sehingga capaian kinerja adalah 101,44% dengan kategori Sangat Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**
Realisasi kinerja untuk indikator Pendapatan per kapita



tahun 2023 sebesar 54,89 juta dan capaian kinerja sebesar 101,44%. Indikator pendapatan per kapita ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator baru dalam RPD tahun 2023-2026.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**

Realisasi kinerja Pendapatan per kapita tahun 2023 sebesar 54,89 juta sedangkan arget akhir RPD tahun 2026 adalah sebesar 59,16 juta, dengan demikian pada tahun pertama target akhir RPD belum tercapai.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK) Kota Salatiga tahun 2023 terealisasi sebesar 54,89 juta. Angka tersebut lebih tinggi dari PDRB ADHK Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang sebesar 29,37 juta dan angka PDRB ADHK secara nasional di tahun 2023 yang sebesar 44,14 juta.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah:

- 1) Mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lokal yang berpotensi, seperti industri kreatif, pariwisata, dan manufaktur ringan.
- 2) Memberikan dukungan dan insentif bagi pengusaha lokal untuk memulai dan mengembangkan usaha.
- 3) Melakukan promosi aktif untuk menarik investasi, dan wisatawan untuk membantu meningkatkan aktivitas ekonomi.

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pendapatan per kapita

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Pendapatan per kapita *PDRB ADHK	101,44 %	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	48.000.000	47.967.550	99,93%	99,01%
		Penilaian Kesehatan KSP/ USP koperasi	50.000.000	50.000.000	100,00%	99,01%
		Pendidikan dan Latihan perkoperasian	263.000.000	259.422.300	98,64%	99,03%
		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	697.850.000	687.731.450	98,55%	99,03%
		Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dann usaha mikro	614.225.000	597.395.400	97,26%	99,04%



Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	2.019.735.000	1.964.259.000	99,89%	99,02%
		Hubungan industrial	144.684.200	144.530.000	90,17%	99,11%
		Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.196.059.200	1.980.188.686	53,38%	99,47%
		Penempatan tenaga kerja	726.017.000	387.556.500	73,14%	99,28%
		Pengelolaan keuangan daerah	3.949.652.237	1.186.069.890	81,94%	99,19%
		Pengelolaan barang milik daerah	1.708.500.000	1.399.973.657	93,27%	99,08%
		Pengelolaan pendapatan daerah	2.217.456.700	2.068.138.250	99,80%	99,02%
		Perizinan dan pendaftaran perusahaan	8.220.000	8.203.500	94,34%	99,07%
		Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	4.140.692.700	3.906.477.198	4,38%	99,96%
		Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1.046.112.000	45.835.250	95,89%	99,05%
		Pengembangan ekspor	148.230.000	142.135.000	51,15%	99,50%
		Standarisasi dan perlindungan konsumen	61.252.000	31.331.500	90,95%	99,10%
		Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	2.413.390.400	2.195.009.825	90,38%	99,11%
		Pemasaran pariwisata	1.177.510.630	1.064.201.000	97,98%	99,03%
		Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	100.000.000	97.980.000	97,55%	99,04%
		Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	623.563.700	608.267.900	96,39%	99,05%
		Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.103.353.000	1.817.271.750	86,40%	99,15%
		Penyuluhan pertanian	252.200.000	239.208.700	94,85%	99,06%
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	123.158.900	121.059.000	98,29%	99,03%
		Pengelolaan perikanan budidaya	763.706.000	758.371.050	99,30%	99,02%
		Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	133.467.400	130.015.300	97,41%	99,04%
		Penegndalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner	358.592.000	323.695.800	90,27%	99,11%
		Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	8.381.000	8.180.000	97,60%	99,04%



Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Pengawasan keamanan pangan	51.722.910	49.045.300	94,82%	99,07%
		Penanganan kerawanan pangan	9.652.600	6.812.000	70,57%	99,30%
Efisiensi						99,15%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 30 (program) untuk mendukung capaian Pertumbuhan Ekonomi yaitu:

- 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan anggaran Rp48.000.000,- dan terealisasi Rp47.967.550,- atau sebesar 99,93% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%.
- 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan anggaran Rp50.000.000,- dan terealisasi Rp50.000.000,- atau sebesar 100,00% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%.
- 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran Rp263.000.000,- dan terealisasi Rp259.422.300,- atau sebesar 98,64% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,03%.
- 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran Rp697.850.000,- dan terealisasi Rp687.731.450,- atau sebesar 98,55% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,03%.
- 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran Rp614.225.000,- dan terealisasi Rp597.395.400,- atau sebesar 97,26% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%.
- 6) Program Hubungan Industrial dengan anggaran Rp144.684.200,- dan terealisasi Rp144.530.000,- atau sebesar 99,89% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.
- 7) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran Rp2.196.059.200,- dan terealisasi Rp1.980.188.686,- atau sebesar 90,17% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,11%.
- 8) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran Rp726.017.000,- dan terealisasi Rp387.556.500,- atau sebesar 53,38% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,47%.
- 9) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran Rp3.949.652.237,- dan terealisasi Rp2.888.610.127,- atau sebesar 73,14% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,28%.
- 10) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran Rp1.708.500.000,- dan terealisasi Rp1.399.973.657,- atau sebesar 81,94% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,19%.
- 11) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran Rp2.217.456.700,- dan terealisasi



- Rp2.068.139.250,- atau sebesar 93,27% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,08%.
- 12) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan anggaran Rp8.220.000,- dan terealisasi Rp8.203.500,- atau sebesar 99,80% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.
 - 13) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran Rp4.140.692.700,- dan terealisasi Rp3.906.477.198,- atau sebesar 94,34% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%.
 - 14) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan anggaran Rp1.046.112.000,- dan terealisasi Rp45.835.250,- atau sebesar 4,38% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,96%.
 - 15) Program Pengembangan Ekspor dengan anggaran Rp148.230.000,- dan terealisasi Rp142.135.000,- atau sebesar 95,89% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,05%.
 - 16) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran Rp61.252.000,- dan terealisasi Rp31.331.500,- atau sebesar 51,15% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,5%.
 - 17) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan anggaran Rp2.413.390.400,- dan terealisasi Rp2.195.009.825,- atau sebesar 90,95% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,1%.
 - 18) Program Pemasaran Pariwisata dengan anggaran Rp1.177.510.630,- dan terealisasi Rp1.064.201.000,- atau sebesar 90,38% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,11%.
 - 19) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan anggaran Rp100.000.000,- dan terealisasi Rp97.980.000,- atau sebesar 97,98% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,03%.
 - 20) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan anggaran Rp623.563.700,- dan terealisasi Rp608.267.900,- atau sebesar 97,55% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%.
 - 21) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran Rp3.494.674.800,- dan terealisasi Rp3.368.471.747,- atau sebesar 96,39% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,05%.
 - 22) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran Rp2.103.353.000,- dan terealisasi Rp1.817.271.750,- atau sebesar 86,40% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,15%.
 - 23) Program Penyuluhan Pertanian dengan anggaran Rp252.200.000,- dan terealisasi Rp239.208.700,- atau



sebesar 94,85% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,06%.

- 24) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan anggaran Rp123.158.900,- dan terealisasi Rp121.059.000,- atau sebesar 98,29% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,03%.
- 25) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan anggaran Rp763.706.000,- dan terealisasi Rp758.371.050,- atau sebesar 99,30% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.
- 26) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran Rp133.467.400,- dan terealisasi Rp130.015.300,- atau sebesar 97,41% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%.
- 27) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan anggaran Rp358.592.000,- dan terealisasi Rp323.695.800,- atau sebesar 90,27% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,11%.
- 28) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan anggaran Rp8.381.000,- dan terealisasi Rp8.180.000,- atau sebesar 97,60% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%.
- 29) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan anggaran Rp51.722.910,- dan terealisasi Rp49.045.300,- atau sebesar 94,82% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%.
- 30) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan anggaran Rp9.652.600,- dan terealisasi Rp6.812.000,- atau sebesar 70,57% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,3%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Pendapatan per kapita sebesar 99,15%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator sasaran ini adalah:

• Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase koperasi yang berkualitas.
- 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program



Persentase KSP/USP koperasi sehat, dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian.

- 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian progam Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan.
- 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi.
- 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yang iarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan.

• **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan swasta.
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan sasaran pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah.
- 3) Program Hubungan Industrial dengan sasaran kegiatan pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

• **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran kegiatan pengelolaan barang milik daerah untuk mencapai indikator kinerja program Asset Management.
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan



sasaran kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dengan capaian program Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

- **Dinas Perdagangan**

- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan sasaran kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, dan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan sasaran kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.
- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan sasaran kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar serta pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah.
- 4) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan sasaran kegiatan pelaksanaan metrologo legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- 5) Program Pemasaran ekspor dengan sasaran kegiatan pelaksanaan promosi melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan.

- **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan capaian program jumlah objek wisata.
- 2) Program Pemasaran Pariwisata yang diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan capaian program jumlah kegiatan/fasilitasi pemasaran pariwisata.
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif dengan capaian program Jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif.
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan capaian program Jumlah Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata dan



Ekonomi Kreatif.

• **Dinas Pangan dan Pertanian**

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan untuk mencapai target kinerja penyediaan infrastruktur pangan.
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan yang diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai target indikator kinerja penanganan rumah tangga rawan pangan.
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk mencapai target pangan segar.
- 4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program capaian bina kelompok pembudidaya ikan dan presentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
- 5) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang diarahkan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dengan capaian program cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan dan presentase kelompok kelompok pengelola dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota, peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain, dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan sarana pertanian,
- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan prasarana pertanian.
- 8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan capaian program jumlah kejadian bencana pertanian.



- 9) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan dengan capaian program Mortalitas Hewan/ternak akibat penyakit zoonosis.
- 10) Program Penyuluhan Pertanian yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan capaian program Cakupan Bina Kelompok Tani untuk Pemula, Lanjut, Madya dan Utama.

6. Tujuan/Sasaran Strategis: Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.

Tujuan/Sasaran Strategis 6 (enam) mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu pertumbuhan nilai investasi, Tingkat pengangguran terbuka dan Tingkat partisipasi Angkatan kerja.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 6 (enam) adalah:

1. Meningkatnya capaian realisasi PMA dan PMDN dengan variabel indikator Kinerja Daerah (IKD):
 - a. Persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)
 - b. Persentase kenaikan nilai investasi PMDN
 - c. Persentase kenaikan nilai investasi PMA

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah

➤ **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase pencari kerja yang ditempatkan.
3. Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):
 - a. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki izin
 - b. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu tenaga kerja

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

6.1 Pertumbuhan Nilai Investasi

Pertumbuhan nilai investasi adalah peningkatan dalam jumlah atau nilai total investasi yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, atau individu dalam suatu periode waktu tertentu. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pertumbuhan nilai investasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan formulasi sebagai berikut :

Pertumbuhan Nilai Investasi

$$= \frac{\text{Realisasi Investasi Tahun Evaluasi} - \text{Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertumbuhan Nilai Investasi:

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pertumbuhan Nilai Investasi

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10,00	10,22	10,4	10,55	10,55
Realisasi						
Pertumbuhan Nilai Investasi	%	52,17	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Pertumbuhan Nilai Investasi	%	521,70	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : DPMPTSP

Indikator Pertumbuhan Nilai Investasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja indikator kinerja Utama Pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target indikator Pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2023 sebesar 10,00% dan terealisasi sebesar 52,17% sehingga capaian kinerja indikator Pertumbuhan Nilai Investasi adalah 521,70% dengan kategori Sangat Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Realisasi kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2023 sebesar 52,17 dan capaian kinerja sebesar 521,70%. Apabila dibandingkan dengan tahun tahun 2021 sebesar 154,35 dan akhir RPJMD tahun 2022 sebesar -70,29. Dengan demikian

- realisasi dan capaian kinerja untuk indikator Pertumbuhan Nilai Investasi sudah melebihi target yang ditentukan.
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**
Realisasi Kinerja tahun 2023 sebesar 52,17% Apabila melihat target akhir RPD tahun 2026 sebesar 10,55%, target RPD di tahun pertama untuk indikator Pertumbuhan Nilai Investasi sudah tercapai.
- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi.
- e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**
Faktor pendorong keberhasilan untuk indikator ini diantaranya
- 1) Kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM secara berkala menjadi salah satu factor peningkatan nilai investasi di Kota Salatiga
 - 2) Sosialisasi dan pendampingan penyusunan LKPM juga masih secara intensif dilaksanakan
 - 3) Promosi potensi dan peluang investasi untuk meningkatkan daya tarik investasi
- f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**
Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.23
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Pertumbuhan nilai investasi	521,70 %	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	131.500.000	127.470.400	96,94%	99,81%
		Promosi Penanaman Modal	259.203.000	254.363.500	98,13%	99,81%
		Pelayanan Penanaman Modal	76.578.438	72.306.900	94,42%	99,82%
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	419.215.000	393.423.500	93,85%	99,82%
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	90.000.000	86.118.700	95,69%	99,82%
Efisiensi						99,67%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 5 program untuk mendukung capaian indikator Pertumbuhan Nilai Investasi yaitu:

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran Rp131.500.000,- dan terealisasi Rp127.470.400,- atau sebesar 96,94% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,81%.



- 2) Program Promosi Penanaman Modal dengan anggaran Rp259.203.000,- dan terealisasi Rp254.363.500,- atau sebesar 98,13% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,81%.
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran Rp76.578.438,- dan terealisasi Rp72.306.900,- atau sebesar 94,42% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,82%.
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran Rp419.215.000,- dan terealisasi Rp393.423.500,- atau sebesar 93,85% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,82%.
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan anggaran Rp90.000.000,- dan terealisasi Rp86.118.700,- atau sebesar 95,69% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,82%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Pertumbuhan Nilai Investasi sebesar 99,82%.

g. Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target indikator Pertumbuhan nilai investasi di dukung oleh Program antara lain:

• **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan pembuatan dokumen pendukung iklim penanaman modal.
- 2) Program Promosi Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah ukuran persentase dari jumlah orang yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil menemukannya dalam suatu populasi tertentu, seperti populasi pekerja atau angkatan kerja

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan formulasi sebagai berikut :

Tingkat Pengangguran Terbuka

$$= \frac{\text{jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pengangguran Terbuka:

Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pengangguran Terbuka						
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,76	6,52	6,30	6,12	6,12
Realisasi						
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,57	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	132,40	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : BPS

Indikator Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin kecil realisasi semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja indikator kinerja Utama Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target indikator Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 6,76% dan terealisasi sebesar 4,57% sehingga capaian kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 132,40% dengan kategori Sangat Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Realisasi kinerja Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 4,57% dan capaian kinerjanya sebesar 132,40%. Apabila dibandingkan dengan tahun tahun 2021 adalah 7,26% dan akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 5,58%, realisasi dan capaian kinerja untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka selalu mengalami peningkatan.
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**



Jika realisasi kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 sebesar 4,57% dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2023 sebesar 6,12%, maka target akhir RPD telah tercapai di realisasi tahun pertama RPD.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Agustus 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia sebesar 5,32% dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,13%. Berdasarkan data tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 di Kota Salatiga lebih rendah dari Tingkat Pengangguran Terbuka secara nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Penyebab belum berhasilnya indikator ini adalah masih belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja. Upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan diantaranya :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM dengan peningkatan jenjang pendidikan karena pendidikan.
- 2) Membuka lapangan pekerjaan.
- 3) Memfasilitasi program pra kerja.

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.25
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Tingkat pengangguran terbuka	132,40 %	Pelatihan kerja dan produktivitas kerja	2.196.059.200	1.980.188.686	90,17%	99,32%
		Penempatan tenaga kerja	726.017.000	387.556.500	53,38%	99,60%
		Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.034.262.100	1.264.158.800	62,14%	99,53%
		Pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota	17.899.000	15.325.000	85,62%	99,35%
		Pengelolaan sistem informasi industri nasional	17.899.000	15.325.000	85,62%	99,35%
Efisiensi						99,45%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 5 program untuk mendukung capaian indikator Kawasan Wajah Kota yang tertata dengan Baik yaitu:

- 1) Program Pelatihan kerja dan produktivitas kerja dengan anggaran Rp2.196.059.200,- dan terealisasi Rp1.980.188.686,- atau sebesar 90,17%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,32%.



- 2) Program Penempatan tenaga kerja dengan anggaran Rp726.017.000,- dan terealisasi Rp387.556.500,- atau sebesar 53,38%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,60%.
- 3) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran Rp2.034.262.100,- dan terealisasi Rp1.264.158.800,- atau sebesar 62,14%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,53%.
- 4) Program Pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp17.899.000,- dan terealisasi Rp15.325.000,- atau sebesar 85,62%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,35%.
- 5) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan anggaran Rp17.899.000,- dan terealisasi Rp15.325.000,- atau sebesar 85,62%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,35%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Tingkat pengangguran terbuka sebesar 99,45%.

g. Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka didukung oleh program antara lain:

• **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja dengan sasaran kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan swasta.
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan sasaran kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan penertiban perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 daerah.
- 3) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan sasaran kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri.
- 4) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 5) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan sasaran kegiatan penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI kewenangan Kota.



6.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan proporsi dari populasi usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik dalam pekerjaan yang dipekerjakan maupun mencari pekerjaan. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan formulasi sebagai berikut :

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

$$= \frac{\text{jumlah penduduk bekerja}}{\text{jumlah penduduk usia kerja}} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja:

Tabel 3.26
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,71	69,84	69,97	70,1	70,1
Realisasi						
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,09	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	103,41	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : BPS

Indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Nilai dalam indikator ini merupakan nilai yang diukur oleh BPS tahun 2023. Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja indikator kinerja Utama Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2023 sebesar 69,71% dan terealisasi sebesar 72,09% sehingga capaian kinerja indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 103,41% dengan kategori Sangat Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Realisasi kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2023 sebesar 72,09% dan capaian kinerjanya sebesar 103,41% indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan

- realisasi tahun sebelumnya dikarenakan ini merupakan indikator baru di tahun 2023.
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**
Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 72,09% bila dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 70,1% maka untuk indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di tahun pertama sudah tercapai dan melebihi target yang ditentukan.
- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Agustus 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Indonesia sebesar 69,48% dan 70,59% di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2023 di Kota Salatiga lebih tinggi dari capaian secara nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
- e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini antara lain:
- 1) Penurunan penduduk usia kerja (penduduk yang berusia 15 tahun ke atas)
 - 2) Penurunan Angkatan kerja dimana jumlah orang yang bekerja meningkat dan jumlah pengangguran mengalami penurunan
- f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**
Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.27
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Tingkat partisipasi angkatan kerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Tingkat partisipasi Angkatan kerja	103,41 %	Pelatihan kerja dan produktivitas kerja	2.196.059.200	1.980.188.686	90,17	99,13%
		Penempatan tenaga kerja	726.017.000	387.556.500	53,38	99,48%
		Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.034.262.100	1.264.158.800	62,14	99,40%
		Pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota	17.899.000	15.325.000	85,62	99,17%
		Pengelolaan sistem informasi industri nasional	17.899.000	15.325.000	85,62	99,17%
Efisiensi						99,29%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 5 program untuk mendukung capaian indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja dengan Baik yaitu:



- 1) Program Pelatihan kerja dan produktivitas kerja dengan anggaran Rp2.196.059.200,- dan terealisasi Rp1.980.188.686,- atau sebesar 90,17%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,13%.
- 2) Program Penempatan tenaga kerja dengan anggaran Rp726.017.000,- dan terealisasi Rp387.556.500,- atau sebesar 53,38%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,48%.
- 3) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran Rp2.034.262.100,- dan terealisasi Rp1.264.158.800,- atau sebesar 62,14%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,40%.
- 4) Program Pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp17.899.000,- dan terealisasi Rp15.325.000,- atau sebesar 85,62%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,17%.
- 5) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan anggaran Rp17.899.000,- dan terealisasi Rp15.325.000,- atau sebesar 85,62%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,17%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja baik sebesar 99,29%.

g. Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka didukung oleh Program antara lain:

• Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja dengan sasaran kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan swasta.
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan sasaran kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan penertiban perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 daerah.
- 3) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan sasaran kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri.
- 4) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



- 5) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan sasaran kegiatan penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI kewenangan Kota.

7. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.

Tujuan/Sasaran Strategis 7 (tujuh) Meningkatkan Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS; Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 7 (tujuh) adalah meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

- a. Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani;
- b. Angka Kemiskinan.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Dinas Sosial**

2. Pola Pangan Harapan;

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 7 (tujuh) adalah meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

- a. Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan;
- b. Ketersediaan energi per kapita;
- c. Ketersediaan protein per kapita.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Dinas Pangan dan Pertanian**

3. Persentase Peminat Transmigrasi.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 7 (tujuh) adalah Meningkatnya minat untuk menjadi transmigrasi dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) yaitu Persentase peningkatan peminat transmigrasi.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

7.1 Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan formulasi sebagai berikut :

Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk terdata dalam DTKS}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang memenuhi}} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS:

Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Cakupan Penduduk Memenuhi Kriteria yang Terdata dalam DTKS

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	94,5	95	95,5	96	96
Realisasi						
Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	94,56	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	100,06	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : Dinas Sosial

Indikator Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja indikator kinerja Utama Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS Tahun 2023 adalah 94,5% dan realisasi kinerjanya sebesar 94,56%. Berdasarkan hasil realisasi tersebut maka capaian kinerja untuk Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS adalah 100,06% dengan kategori Sangat Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**
Realisasi kinerja untuk indikator Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS 2023 adalah 94,56% dan capaian kinerjanya adalah 100,06%. Indiaktor ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya

- dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru dalam RPD tahun 2023.
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**
Realisasi kinerja untuk indikator Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS 2023 adalah 94,56% dan capaian kinerjanya adalah 100,06. Sehingga target akhir RPD tahun 2026 belum berhasil dicapai dengan target sebesar 96%.
- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
Tidak ada target standar nasional untuk indikator cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS
- e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**
Analisis penyebab keberhasilan indikator ini antara lain:
1) Melaksanakan koordinasi yang intensif secara vertical dan horizontal dengan stakeholder dan mitra Lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan:
2) Pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
3) Penangan regabilitasi sosial pemerlu kesejahteraan
- f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**
Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.29
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Cakupan Penduduk Memenuhi Kriteria yang Terdata dalam DTKS

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	100,22%	Pemberdayaan Sosial	1.135.504.200	1.095.002.029	96,43%	99,04%
		Rehabilitasi Sosial	1.095.296.052	1.080.041.382	98,61%	99,01%
		Perlindungan dan jaminan sosial	3.361.852.000	3.038.305.622	90,38%	99,10%
		Penanganan Bencana	55.250.000	51.869.500	93,88%	99,06%
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	188.957.900	187.675.858	99,32%	99,01%
Efisiensi						99,07%

Sumber : Data yang diolah

- Terdapat 5 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Baik yaitu:
- 1) Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran Rp1.135.504.200,- dan terealisasi Rp1.095.002.029,- atau sebesar 96,43% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%.



- 2) Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran Rp1.095.296.052,- dan terealisasi Rp1.080.041.382,- atau sebesar 98,61% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%.
- 3) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan anggaran Rp3.361.852.000,- dan terealisasi Rp3.038.305.622,- atau sebesar 90,38% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,10%.
- 4) Program Penanganan Bencana dengan anggaran Rp55.250.000,- dan terealisasi Rp51.869.500,- atau sebesar 93,88% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,06%.
- 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan anggaran Rp188.957.900,- dan terealisasi Rp187.675.858,- atau sebesar 99,32% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS sebesar 99,07%.

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS antara lain:

• Dinas Sosial

- 1) Program Pemberdayaan Sosial dengan sasaran kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk mencapai indikator kinerja persentase terbentuknya lembaga Puskesmas, persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment, persentase PSKS yang dibina.
- 2) Program Rehabilitasi Sosial dengan sasaran kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan sasaran kegiatan pengelolaan data fakir miskin.
- 4) Program Penanganan Bencana dengan sasaran kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
- 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan sasaran kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota

7.2 Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan di wilayah tertentu. PPH mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani,

buah/biji berminyak, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta aneka bumbu dan bahan minuman. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pola Harapan Pangan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Pola Pangan Harapan} = \text{Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{bobot tiap kelompok pangan}$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pola Pangan Harapan:

Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pola Pangan Harapan						
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Pola Pangan Harapan	Skor	92,2	94,4	96,6	98,8	98,8
Realisasi						
Pola Pangan Harapan	Skor	92,4	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Pola Pangan Harapan	%	100,22	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Indikator Pola Pangan Harapan merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja indikator kinerja Utama Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target indikator Pola Pangan Harapan tahun 2023 adalah 92,2 dan realisasi kinerjanya sebesar 92,4. Berdasarkan hasil realisasi tersebut maka capaian kinerja untuk Pola Pangan Harapan adalah 100,22% dengan kategori Sangat Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**
Realisasi kinerja untuk indikator Pola Pangan Harapan 2023 adalah 92,4 dengan capaian kinerja sebesar 100,22%. Sehingga apabila dibandingkan realisasi akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 95,1 Pola Pangan Harapan di tahun 2023 mengalami penurunan.
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**
Realisasi Kinerja Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS tahun 2023 adalah 92,4 sedangkan target akhir RPD tahun 2026 adalah 98,80.

- Dengan demikian pada tahun pertama target akhir RPD belum dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan
- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2023 secara nasional sebesar 94,1 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 94,2. Dengan data tersebut, Pola Pangan Harapan di Kota Salatiga pada tahun 2023 masih lebih rendah dari nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
- e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**
Keberhasilan indikator ini diantaranya dengan meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dan memastikan ketersediaan pangan sumber energi dan protein yang memadai untuk setiap orang.
- f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**
Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.31
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pola Pangan Harapan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Pola Pangan Harapan	100,22%	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1.556.978.400	1.056.772.200	67,87%	99,32%
Efisiensi						99,32%

Sumber : Data yang diolah

- Terdapat 1 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Baik yaitu:
- 1) Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan anggaran Rp1.556.978.400,- dan terealisasi Rp1.056.772.200,- atau sebesar 67,87%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,32%.
- Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Pola Pangan Harapan sebesar 99,32%.
- g. **Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**
Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja presentase Wilayah dengan Infrastruktur baik antara lain:
- **Dinas Pangan dan Pertanian**
 - 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

7.3 Persentase Peminat Transmigrasi

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Persentase Peminat Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase Peminat Transmigrasi} = \frac{\text{Jumlah calon transmigran yang berminat}}{\text{Peserta penyuluhan catran}} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peminat Transmigrasi:

Tabel 3.32

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Persentase Peminat Transmigrasi

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Persentase Peminat Transmigrasi	%	3,3	3,7	4,07	4,6	4,6
Realisasi						
Persentase Peminat Transmigrasi	%	25	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Persentase Peminat Transmigrasi	%	757,58	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : Disperinaker

Realisasi Persentase Peminat Transmigrasi didapatkan dari 4 orang yang telah mendapat sosialisasi dengan peminat transmigrasi sebanyak 1 orang. Indikator Persentase Peminat Transmigrasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja indikator kinerja Utama Persentase Peminat Transmigrasi tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target indikator Persentase Peminat Transmigrasi Tahun 2023 adalah 3,30% dan realisasi kinerjanya sebesar 25 % Berdasarkan hasil realisasi tersebut maka capaian kinerja adalah 757,58% dengan kategori Sangat Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**
Realisasi kinerja untuk indikator Persentase Peminat Transmigrasi tahun 2023 adalah 25% dan capaian kinerjanya adalah 757,58% indikator ini merupakan indikator baru dalam RPD tahun 2023 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun lalu.



c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Realisasi Kinerja Persentase Peminat Transmigrasi tahun 2023 adalah 25% sedangkan target akhir RPD 2026 adalah 4,6%. Dengan demikian target RPD tahun pertama sudah jauh melebihi target yang ditetapkan.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja Persentase Peminat Transmigrasi

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan indikator ini diantaranya melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigrasi dan faktor ekonomi yang menjadi alasan utama untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan menjadi upaya untuk merubah nasib dalam perekonomian keluarganya

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.33
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Persentase Peminat Transmigrasi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Persentase Peminat Transmigrasi	757,58%	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0	0	0%	100%
Efisiensi						100%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 1 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Peminat Transmigrasi yaitu:

- 1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan anggaran Rp0,-dan terealisasi Rp0,- atau sebesar 0%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Peminat Transmigrasi sebesar 100%.

g. **Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja presentase Wilayah dengan Infrastruktur baik antara lain:

- **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

- 1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan sasaran kegiatan penataan persebaran penduduk.



8. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Tujuan/Sasaran Strategis 8 (delapan) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan/sasaran Strategis 8 (delapan) adalah:

1. Score capaian KLA

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan/sasaran strategis 8 (delapan) adalah Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

- a. Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan;
- b. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislative.

2. IDG

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan/sasaran strategis 8 (delapan) adalah Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan

3. IPG

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan/sasaran strategis 8 (delapan) adalah Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 8 (delapan) adalah:

- **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

8.1 Skor capaian KLA

Kota Layak Anak merupakan Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi skor KLA dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Skor KLA} = & \text{Skor Aspek Kelembagaan} + \text{Skor Nilai Kluster 1} \\ & + \text{Skor Nilai Kluster 2} + \text{Skor Nilai Kluster 3} \\ & + \text{Skor Nilai Kluster 4} + \text{Skor Nilai Kluster 5} \\ & + \text{Skor Nilai Kecamatan / Desa} \\ & / \text{Kelurahan Layak Anak} \end{aligned}$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Skor capaian KLA:



Tabel 3.34
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Skor capaian KLA

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Skor capaian KLA	Nilai	615	620	625	630	630
Realisasi						
Skor capaian KLA	Nilai	611	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Skor capaian KLA	%	99,35	-	-	-	-
Kategori		Baik				

Sumber : DP3APPKB

Indikator kinerja skor capaian KLA merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) skor capaian KLA tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target skor capaian KLA tahun 2023 sebesar 615 dan terealisasi sebesar 611 sehingga capaian kinerja tahun 2023 adalah 99,35% atau dengan kategori Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Realisasi kinerja skor capaian KLA tahun 2023 sebesar 611 dengan capaian kinerja sebesar 99,35% apabila dibandingkan dengan realisasi akhir RPJMD 2016-2022 sebesar 607,35 maka realisasi kinerja skor capaian KLA mengalami peningkatan.
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**
Realisasi kinerja skor capaian KLA tahun 2023 sebesar 611 sedangkan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 630. Dengan demikian target akhir RPD belum tercapai sesuai target yang ditetapkan pada tahun pertama.
- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013, standar nasional skor kota layak anak adalah 1000, maka jika dibandingkan dengan skor capaian tahun 2023 sebesar 611, Kota Salatiga masih perlu meningkatkan kinerjanya untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan.
- e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**



Pencapaian skor capaian KLA tidak terlepas dari peran semua Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dilingkungan Kota Salatiga dalam mendukung pengisian dan verifikasi data kota layak anak serta peran aktif rumanksa sebagai forum anak Kota Salatiga dalam kegiatan yang diadakan.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian kota layak anak yaitu:

- 1) Advokasi pendidik sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak di sekolah
- 2) Penanganan kasusu kekerasan pada anak
- 3) Orientasi system perlindungan anak (SPA) bagi aparat kelurahan dan kecamatan
- 4) Lokakarya disiplin positif menuju sekolah ramah anak (SRA)
- 5) Pembentukan rumah ibadah anak
- 6) Pembentukan forum anak sampai ke tingkat kelurahan
- 7) Pembentukan kelurahan layak anak
- 8) Sosialisasi pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta kasih saying dalam keluarga

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.35
Efisiensi Penggunaan Sumber daya Capaian Indikator Kinerja Skor Capaian KLA

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Skor capaian KLA	99,35%	Peningkatan Kualitas Keluarga	553.400.600	538.922.790	97,38%	99,02%
		Pengelolaan sistem data gender dan anak	62.246.000	60.600.000	97,36%	99,02%
		Pemenuhan hak anak (PHA)	544.061.950	513.614.700	94,40%	99,05%
		Perlindungan khusus anak	79.656.000	77.632.400	97,46%	99,02%
Efisiensi						99,03%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 4 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Skor Capaian KLA pada DP3APPKB yaitu:

- 1) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan anggaran Rp553.400.600,- dan terealisasi Rp538.922.790,- atau sebesar 97,38% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.
- 2) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak dengan anggaran Rp62.246.000,- dan terealisasi Rp60.600.000,- atau sebesar 97,36% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.
- 3) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) dengan anggaran Rp544.061.950,- dan terealisasi Rp513.614.700,- atau sebesar 94,40% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,05%.

- 4) Program Perlindungan Khusus Anak dengan anggaran Rp79.656.000,- dan terealisasi Rp77.632.400,- atau sebesar 97,46% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.
Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Skor Capaian KLA sebesar 99,04%.
- g. Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Skor Capaian KLA antara lain:
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1) Program Perlindungan Khusus Anak dengan sasaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - 2) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan sasaran kegiatan pelebagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
 - 3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan sasaran kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.
 - 4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan sasaran kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak.

8.2 IDG

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG diukur dalam tiga dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan.
Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur nilai IDG dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan formulasi sebagai berikut :

IDG =

$$\frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-des)}}{3}$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) IDG:

Tabel 3.36

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

IDG

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
IDG	Nilai	80	80,05	81	81,5	81,5
Realisasi						
IDG	Nilai	79,48	-	-	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Capaian Kinerja						
IDG	%	99,35	-	-	-	-
Kategori		Baik				

Sumber : BPS

Indikator kinerja IDG merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) IDG tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Target IDG tahun 2023 sebesar 80 dan terealisasi sebesar 79,48 sehingga capaian kinerja adalah sebesar 99,35% atau dengan kategori Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi kinerja IDG tahun 2023 adalah sebesar 79,48 dengan capaian kinerja 99,35%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 79,08 dan tahun 2022 sebesar 79,29 maka realisasi IDG di Kota Salatiga selalu mengalami kenaikan setiap tahun.
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Target akhir indikator IDG pada RPD tahun 2026 adalah 81,5 sedangkan nilai IDG Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar 79,48. Sehingga target akhir RPD belum berhasil dicapai pada realisasi di tahun pertama.
- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Berdasarkan data BPS tahun 2023, nilai IDG Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,18 dan Indonesia sebesar 76,9. Sehingga pada tahun 2023 realisasi IDG Kota Salatiga lebih tinggi dari realiasi IDG Provinsi Jawa Tengah bahkan secara nasional.
- e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Meningkatkan Pencapaian Kualitas Hidup Perempuan Melalui :

1) Percepatan PPRG bagi OPD;

2) Fasilitasi pengembangan kelembagaan PUG;

3) Meningkatkan Ketrampilan dan pengembangan usaha perempuan;

4) meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik; dan pengembangan jaringan



- f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**
Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.37
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja IDG

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
IDG	99,35%	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	128.948.500	122.906.000	95,31	99,04%
		Perlindungan Perempuan	532.391.400	264.705.466	49,72%	99,50%
		Peningkatan Kualitas Keluarga	553.400.600	538.922.790	97,38%	99,02%
Efisiensi						99,23%

Sumber : Data yang diolah

- Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja IDG pada DP3APPKB yaitu:
- 1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran Rp128.948.500,- dan terealisasi Rp122.906.000,- atau sebesar 95,31% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%.
 - 2) Program Perlindungan Perempuan dengan anggaran Rp532.391.400,- dan terealisasi Rp264.705.466,- atau sebesar 49,72% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,5%.
 - 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan anggaran Rp553.400.600,- dan terealisasi Rp538.922.790,- atau sebesar 97,38% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,02%.
- Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator IDG sebesar 99, 23%.

- g. **Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja IDG pada DP3APPKB antara lain:
- **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
 - 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan sasaran kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik hokum sosial dan ekonomi, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
 - 2) Program Perlindungan Perempuan dengan sasaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan

- perlindungan perempuan.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan sasaran kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak.

8.3 IPG

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk melihat pencapaian laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tiga aspek dasar seperti IPM yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur nilai IPG dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan formulasi sebagai berikut :

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \times 100$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) IPG:

Tabel 3.38
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
IPG

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
IPG	Nilai	95	95,5	96	96,5	96,5
Realisasi						
IPG	Nilai	95,45	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
IPG	%	100,47	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : BPS

Indikator kinerja IPG merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) IPG tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target IPG tahun 2023 sebesar 95 dan terealisasi sebesar 95,45 sehingga capaian kinerja tahun 2023 adalah 100,47% atau dengan kategori Sangat Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Realisasi kinerja IPG tahun 2023 sebesar 95,45 dengan capaian kinerja sebesar 100,47% sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 95,18 dan tahun 2022 sebesar 95,44 maka realisasi IPG di Kota Salatiga terus mengalami kenaikan setiap tahun.



c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Realisasi kinerja IPG tahun 2023 sebesar 95,45 sedangkan terget pada akhir RPD tahun 2026 sebesar 96,5. Dengan demikian pada tahun pertama, target akhir RPD belum berhasil tercapai sesuai target yang ditetapkan.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Data BPS tahun 2023, nilai IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,87 dan secara nasional sebesar 91,85. Berdasarkan data tersebut nilai IPG Kota Salatiga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai IPG Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan IPG dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak melalui :

- 1) KIE penyelenggaraan SIGA;
- 2) Pembuatan sistem Informasi tentang DataGender dan Anak;
- 3) Penyusunan Perwali tentang data gender dan anak;
- 4) Advokasi tentang pentingnya data gender dan anak bagi OPD dan Stakeholder terkait.

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.39
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja IPG

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
IPG	100,47%	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	128.948.500	122.906.000	95,31%	99,05%
		Perlindungan perempuan	532.391.400	264.705.466	49,72%	99,51%
		Peningkatan kualitas keluarga	553.400.600	538.922.790	97,38%	99,03%
Efisiensi						99,24%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 3 program untuk mendukung capaian indikator kinerja IDG pada DP3APPKB yaitu:

- 1) Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan anggaran Rp128.948.500,- dan terealisasi Rp122.906.000,- atau sebesar 95,31%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,05%.
- 2) Program Perlindungan perempuan dengan anggaran Rp532.391.400,- dan terealisasi Rp264.705.466,- atau



sebesar 49,72%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,51%.

- 3) Program Peningkatan kualitas keluarga dengan anggaran Rp553.400.600,- dan terealisasi Rp538.922.790,- atau sebesar 97,38%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,03%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator IPG sebesar 99,24%.

g. Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja IDG pada DP3APPKB antara lain:

- **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan sasaran kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik hokum sosial dan ekonomi, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
- 2) Program Perlindungan Perempuan dengan sasaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan sasaran kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak.

9. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Tujuan/Sasaran strategis 9 (sembilan) Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah hanya terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 9 (sembilan) adalah Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan public dan tatakelola pemerintahan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik;
3. Indeks Kematangan organisasi Daerah;
4. Indeks PMPRB;
5. Nilai SAKIP;

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Sekretariat Daerah**

6. Indeks Inovasi;
7. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan;
8. Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD;



Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

9. Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

10. Indeks Profesionalitas ASN

11. Nilai system Merit

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

12. QA SPIP

13. QA IEPK (indeks efektifitas pengendalian korupsi)

14. QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)

15. Kapabilitas APIP

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Inspektorat Daerah**

16. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

17. Indeks SPBE

18. Persentase ketersediaan data statistik sektoral

19. Tingkat keterbukaan informasi publik

20. Tingkat Pengamanan informasi daerah

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Dinas Komunikasi dan Informatika**

21. Persentase cakupan akta kelahiran (0-18th)

22. Persentase penduduk ber KTP elektronik

23. Persentase anak 0-17 th kurang 1 hari yang memiliki KIA

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

24. Nilai Indeks kepuasan Masyarakat

25. Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2

26. Persentase realisasi usulan hasil musrenbang

27. Persentase PKK aktif

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Kecamatan**

28. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis ini adalah:

➤ **Sekretariat DPRD**

9.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas yang termuat di dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur Indeks Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Berikut tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Reformasi Birokrasi:

Tabel 3.40
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65,50	67,00	68,50	70,00	96,5
Realisasi						
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64,93	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Indeks Reformasi Birokrasi	%	99,13	-	-	-	-
Kategori		Baik				

Sumber : Kemenpan RB

Indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 65,50 sedangkan realisasi sebesar 64,93 sehingga capaian kinerja adalah 99,13% dengan kategori Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**
Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 adalah 64,93 dan capaian kinerjanya adalah 99,13%. Maka apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 66,00 dan tahun 2022 sebesar 66,85 realisasi Indeks Reformasi Birokrasi mengalami penurunan di tahun 2023.
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**
Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 adalah



64,93 sedangkan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 70,00 dengan demikian target akhir Indeks Reformasi Birokrasi di tahun pertama RPD belum bisa tercapai.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Tidak ada standar nasional untuk Indeks Reformasi Birokrasi.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Analisis penyebab kegagalan/penurunan indikator ini dikarenakan:

- 1) Penilaian dengan metode yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya
- 2) Penyesuaian terhadap Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map RB 2020-2024.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Road Map RB Kota Salatiga

Upaya yang dilakukan untuk mendorong tercapainya target Indeks Reformasi Birokrasi

- 1) Koordinasi dengan semua perangkat daerah terkait untuk meningkatkan capaian reformasi birokrasi.
- 2) Menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan RB.
- 3) Meningkatkan capain per indikator dengan Kerjasama dengan semua pihak terkait.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan kelompok kerja Reformasi Birokrasi.

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.41

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indek Reformasi Birokrasi	99,13%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	688.390.539.268	647.326.641.765	94,03%	99,05%
		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.208.810.400	2.148.655.502	66,96%	99,32%
		Perekonomian dan Pembangunan	1.118.587.700	497.969.500	44,52%	99,55%
		Aplikasi Informatika	4.662.178.850	4.590.335.600	98,46%	99,01%
		Informasi dan Komunikasi Publik	719.423.600	702.614.187	97,66%	99,01%
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral	200.619.200	193.422.000	96,41%	99,03%



Sumber : Data yang diolah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023



- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp688.390.539.268,- dan terealisasi Rp647.326.641.765,- atau sebesar 94,03% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,05%
- 2) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran Rp3.208.810.400,- dan terealisasi Rp2.148.655.502,- atau sebesar 66,96% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,32%
- 3) Program Perekonomian Dan Pembangunan dengan anggaran Rp1.118.587.700,- dan terealisasi Rp497.969.500,- atau sebesar 44,52% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,55%
- 4) Program Aplikasi Informatika dengan anggaran Rp4.662.178.850,- dan terealisasi Rp4.590.335.600,- atau sebesar 98,46% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%
- 5) Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan anggaran Rp719.423.600,- dan terealisasi Rp702.614.187,- atau sebesar 97,66% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%
- 6) Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan anggaran Rp200.619.200,- dan terealisasi Rp193.422.000,- atau sebesar 96,41% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,03%
- 7) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran Rp212.183.300,- dan terealisasi Rp201.253.000,- atau sebesar 94,85% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%
- 8) Program Pendaftaran Penduduk dengan anggaran Rp169.023.056,- dan terealisasi Rp151.944.815,- atau sebesar 89,90% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,09%
- 9) Program Pencatatan Sipil dengan anggaran Rp302.488.000,- dan terealisasi Rp222.193.360,- atau sebesar 73,46% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,26%
- 10) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp95.744.000,- dan terealisasi Rp79.278.100,- atau sebesar 82,80% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,16%
- 11) Program Kepegawaian Daerah dengan anggaran Rp1.850.461.300,- dan terealisasi Rp1.558.605.931,- atau sebesar 84,23% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,15%
- 12) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan anggaran Rp2.674.918.000,- dan terealisasi Rp2.385.207.300,- atau sebesar 89,17% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,10%
- 13) Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran Rp285.462.000,- dan terealisasi Rp154.778.900,- atau sebesar 54,22% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,45%



- 14) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan anggaran Rp803.764.100,- dan terealisasi Rp740.305.750,- atau sebesar 92,10% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%
- 15) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran Rp3.949.652.237,- dan terealisasi Rp2.888.610.127,- atau sebesar 73,14% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,26%
- 16) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp1.709.084.100,- dan terealisasi Rp998.108.565,- atau sebesar 58,40% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,41%
- 17) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp1.293.402.200,- dan terealisasi Rp1.186.069.890,- atau sebesar 91,70% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%
- 18) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan anggaran Rp1.299.330.000,- dan terealisasi Rp993.272.800,- atau sebesar 76,44% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,23%
- 19) Program Pengelolaan Arsip dengan anggaran Rp561.418.200,- dan terealisasi Rp541.756.946,- atau sebesar 96,50% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,03%
- 20) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip dengan anggaran Rp5.000.000,- dan terealisasi Rp4.758.900,- atau sebesar 95,18% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,04%
- 21) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd dengan anggaran Rp21.722.008.500,- dan terealisasi Rp20.134.966.445,- atau sebesar 92,69% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,06%
- 22) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp2.413.973.900,- dan terealisasi Rp2.374.523.200,- atau sebesar 98,37% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%
- 23) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan anggaran Rp26.976.634.400,- dan terealisasi Rp26.709.240.349,- atau sebesar 99,01% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,00%
- 24) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran Rp647.489.400,- dan terealisasi Rp624.548.150,- atau sebesar 96,46% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,03%
- 25) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp405.129.000,- dan terealisasi Rp372.959.250,- atau sebesar 92,06% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian



indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi 99,05%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi, terdapat beberapa program yang mendukung antara lain:

• **Sekretariat Daerah**

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan kegiatan pada perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan perangkat daerah; administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; administrasi kepegawaian perangkat daerah; administrasi umum perangkat daerah; pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah; fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah; penataan organisasi; pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan.
- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan sasaran kegiatan administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum dan fasilitasi kerja sama daerah.
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam.

• **Dinas Komunikasi dan Informatika**

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan sasaran kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah.
2. Program Aplikasi Informatika dengan sasaran kegiatan pengelolaan nama domain dan sub domain serta pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah.
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.

• **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- 1) Program Pendaftaran Penduduk dengan sasaran kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan penataan pendaftaran penduduk.



- 2) Program Pencatatan Sipil dengan sasaran kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sasaran kegiatan pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database*, penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan.

• **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- 1) Program Kepegawaian Daerah dengan sasaran kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sasaran kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

• **Inspektorat Daerah**

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta kegiatan pendampingan dan asistensi.

• **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.

• **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan sasaran kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sasaran kegiatan



koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan sasaran kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi.

- **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

- 1) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan sasaran kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
- 2) Program Pengelolaan Arsip dengan sasaran kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional.

- **Sekretariat DPRD**

- 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan sasaran kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Fasilitasi Tugas DPRD.

- **Kecamatan**

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran kegiatan koordinasi pemberdayaan desa dan pemberdayaan kelurahan.
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sasaran kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

10. Tujuan/Sasaran Strategis: Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan.

Tujuan/Sasaran Strategis 10 (sepuluh) Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja Utama (IKU) yaitu

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Strategis 10 (sepuluh) adalah:

1. Cakupan Penanganan Ketentraman Kota



Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Strategis 10 (sepuluh) adalah:

Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

- a. Persentase penegakan perda dan gangguan trantibum yang diselsaikan;
- b. Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota;

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah:

➤ **Satuan Polisi Pamong Praja**

2. Penanggulangan Potensi Konflik

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Strategis 10 (sepuluh) adalah:

- a. Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
- b. Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik social, budaya maupun pandangan politik dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): terselesainya kasus konflik horizontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah:

➤ **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

3. Indeks Katahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Strategis 10 (sepuluh) adalah: Meningkatkan persentase Kelurahan Tangguh Bencana dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

- a. Kelurahan Tangguh Bencana
- b. Indeks Risiko Bencana

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran ini adalah:

➤ **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

10.1 Cakupan Penanganan Ketentraman Kota

Cakupan Penanganan Ketentraman Kota merujuk pada berbagai strategi, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kota tetap aman, damai, dan stabil.

Pengukuran nilai Cakupan Penanganan Ketentraman Kota dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan formulasi sebagai berikut :

Cakupan Penanganan Ketentraman Kota

$$= \frac{\text{jumlah patroli} \times 3 \text{ dalam sehari}}{\text{jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) Cakupan Penanganan Ketentraman Kota:

Tabel 3.42
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Cakupan Penanganan Ketentraman Kota

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	100	100	100	100
Realisasi						
Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	-	-	-	-
Kategori		Baik				

Sumber : Satpol PP

Indikator kinerja indeks Cakupan Penanganan Ketentraman Kota merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Cakupan Penanganan Ketentraman Kota tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target Cakupan Penanganan Ketentraman Kota pada tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian indikator Cakupan Penanganan Ketentraman Kota sebesar 100% dengan kategori Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Realisasi indikator Cakupan Penanganan Ketentraman Kota tahun 2023 adalah 100% dengan capaian kinerja 100%, akan tetapi indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru dalam RPD 2023-2026.
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**
Realisasi Kinerja Cakupan Penanganan Ketentraman Kota tahun 2023 adalah 100% apabila dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 maka untuk indikator kinerja Cakupan Penanganan Ketentraman Kota sudah tercapai di tahun pertama sesuai target yang ditentukan.
- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
Tidak ada standar nasional untuk indikator Cakupan Penanganan Ketentraman Kota.



e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Cakupan Penanganan Ketentraman Kota ini dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga K3, peningkatan intensitas kinerja penegak perda dan peningkatan peran serta fungsi PPNS.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.43
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Cakupan Penanganan Ketentraman Kota

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Cakupan penanganan ketentraman kota	100%	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	2.029.833.300	1.832.452.150	90,28	99,10%
		Pencegahan, penanggulanga, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	784.029.100	720.769.300	91,93	99,08%
Efisiensi						99,09%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 2 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Cakupan Penanganan Ketentraman Kota yaitu:

- 1) Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran Rp2.029.833.300,- dan terealisasi Rp1.832.452.150,- atau sebesar 86,35%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,10%.
- 2) Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dengan anggaran sebesar Rp784.029.100,- dan terealisasi Rp720.769.300,- atau sebesar 91,93%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,08%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Cakupan penanganan ketentraman kota sebesar 99,09%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Cakupan Penanganan Ketentraman Kota, terdapat beberapa program yang mendukung antara lain sebagai berikut:

• Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

- melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat; penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda dan Perwali dan juga Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan sasaran kegiatan pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran.

10.2 Penanggulangan Potensi Konflik

Penanggulangan Potensi Konflik melibatkan serangkaian strategi dan tindakan yang dirancang untuk mencegah timbulnya konflik atau mengelola konflik yang ada sehingga tidak berdampak negatif pada masyarakat atau lingkungan. Pengukuran dan pengolahan data Penanggulangan Potensi Konflik dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan formulasi sebagai berikut :

Penanggulangan Potensi Konflik
$$= \frac{\text{Jumlah konflik yang Tertangani}}{\text{Jumlah Konflik}} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Penanggulangan Potensi Konflik:

Tabel 3.44
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penanggulangan Potensi Konflik

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	100	100	100	100
Realisasi						
Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : Badan Kesbangpol

Indikator kinerja Penanggulangan Potensi Konflik merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.



Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Penanggulangan Potensi Konflik tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator Penanggulangan Potensi Konflik tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja adalah 100% dengan kategori Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Penanggulangan Potensi Konflik tahun 2023 sebesar dan capaian kinerjanya adalah 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Realisasi kinerja Penanggulangan Potensi Konflik tahun 2023 sebesar 100% dan terget akhir RPD tahun 2026 adalah 100% sehingga pada tahun pertama target akhir RPD untuk indikator ini sudah terpenuhi.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional dalam indikator kinerja Penanggulangan Potensi Konflik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain:

- 1) Koordinasi yang intens antara pemerintah Kota Salatiga dengan aparaturnya penegak hukum dan instansi terkait dalam wadah kegiatan cipta kondusifitas Kota Salatiga serta pemberdayaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) serta tim Penanganan konflik sosial.
- 2) Meningkatnya pembinaan kepada masyarakat tentang kewaspadaan nasional.
- 3) Diselenggarakannya rasa patriotisme dengan peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat serta pendidikan karakter.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:



Tabel 3.45
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja
Penanggulangan Potensi Konflik

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Penanggulang an Potensi konflik	100%	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	618.294.000	602.795.600	97,49%	99,03%
		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.250.912.000	1.237.506.000	98,93%	99,01%
		Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	885.413.100	818.520.500	92,45%	99,08%
		Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	7.734.961.964	7.726.921.164	99,90%	99,00%
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	158.665.500	132.673.750	83,62%	99,16%
Efisiensi						99,01%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 5 program untuk mendukung capaian indikator Penanggulangan Potensi Konflik yaitu:

- 1) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran Rp618.294.000,- dan terealisasi Rp602.795.600,- atau sebesar 97,49% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,03%.
- 2) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran Rp1.250.912.000,- dan terealisasi Rp1.237.506.000,- atau sebesar 98,93% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,01%.
- 3) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran Rp885.413.100,- dan terealisasi Rp818.520.500,- atau sebesar 92,45% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,08%.
- 4) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan anggaran Rp7.734.961.964,- dan terealisasi Rp7.726.921.164,- atau sebesar 99,90% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,00%.
- 5) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan anggaran



Rp158.665.500,- dan terealisasi Rp132.673.750,- atau sebesar 83,62% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,16%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Penanggulangan Potensi Konflik sebesar 99,01%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Penanggulangan Potensi Konflik, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Badan Kesbangpol antara lain sebagai berikut:

• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
- 2) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
- 3) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
- 4) Program Peningkatan Peran Partai Politik dalam Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan sasaran kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

10.3 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah didapatkan melalui penjumlahan nilai 7 prioritas dan 71 indikator dalam tools IKD.

Berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana:



Tabel 3.46
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3,84	3,86	3,88	3,9	3,9
Realisasi						
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	5,6	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	%	145,83	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : BPBD

Indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Target indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana tahun 2023 sebesar 3,84 dan terealisasi sebesar 5,6 sehingga capaian kinerja adalah 145,83% dengan kategori Sangat Baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana tahun 2023 sebesar 5,6 dengan capaian kinerja 145,83%. Indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator baru dalam RPD tahun 2023-2026.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**

Realisasi kinerja Penanggulangan Potensi Konflik tahun 2023 sebesar 5,6 dan terget akhir RPD tahun 2026 adalah 3,9 sehingga ditahun pertama RPD untuk indikator ini sudah memenuhi target akhir.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tidak ada standar nasional dalam indikator kinerja Penanggulangan Potensi Konflik



e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan kelurahan Tangguh bencana sebagai komponen ketahanan daerah serta menurunkan indeks resiko bencana daerah dengan berbagai teknologi dan Tindakan mitigasi bencana.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.47
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana	145,83%	Penggulangan bencana	1.100.169.300	802.960.600	72,99%	99,50%
Efisiensi						99,50%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 1 program untuk mendukung capaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana yaitu:

- 1) Program Penggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp1.100.169.300,- dan terealisasi sebesar Rp802.960.600,- atau 72,99%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,50%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana sebesar 99,50%%.

g. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada BPBD antara lain sebagai berikut:

• Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Program Penanggulangan Bencana terdiri sasaran kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penataan sistem dasar penanggulangan bencana.



11. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.

Tujuan/Sasaran 11 (sebelas) meningkatkan kulaitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata hanya terdiri dari 1 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Strategis 11 (sebelas) adalah:

- 1. Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik.
- 2. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

➤ **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

11.1 Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik

Kawasan wajah kota yang tertata merujuk pada bagian-bagian kota yang memiliki infrastruktur yang baik, tata ruang yang teratur, serta estetika yang menarik.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik

$$= \frac{\text{Ruas/lokasi terbagun}}{\text{Target ruas/lokasi penataan wajah kota}} \times 100\%$$

Tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik sebagai berikut:

Tabel 3.48

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik	%	52,5	55	57,5	60	60
Realisasi						
Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik	%	58,82	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata Dengan Baik	%	112,04	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : DPUPR



Indikator kinerja Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian indikator kinerja Utama Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik tahun 2023 dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik tahun 2023 adalah 52,5% dan terealisasi sebesar 58,82% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 112,04% dengan Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik tahun 2023 sebesar 58,82% dan capaiannya sebesar 112,04% sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 50% dan tahun 2022 sebesar 50%. Dengan demikian realisasi kinerja indikator Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik terus mengalami peningkatan

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Realisasi kinerja Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik tahun 2023 sebesar 58,82% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 60%, yang berarti pada tahun pertama target akhir RPD belum tercapai sesuai target yang ditentukan.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab tercapainya indikator Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik antara lain:

1. Membangun, memelihara dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur umum.
2. Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan dan lingkungannya dan memfasilitasi tenaga/usaha jasa konstruksi menjadi tenaga trampil bersertifikat dan paham aturan jasa konstruksi.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:



Tabel 3.49
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja
Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik	112,04%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.565.238.000	9.777.798.315	92,55	99,17%
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.009.507.000	6.705.952.106	95,67	99,15%
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	14.779.478.277	13.282.231.771	89,87	99,20%
		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.991.613.338	4.403.251.450	88,21	99,21%
		Penyelenggaraan Jalan	28.295.692.000	25.864.406.453	91,41	99,18%
		Penataan Bangunan Gedung	848.765.000	743.567.000	87,61	99,22%
		Penataan Bangunan dan Lingkungannya	769.663.268	767.743.268	99,75	99,11%
		Pengembangan Jasa Kontruksi	232.464.000	138.468.500	59,57	99,47%
		Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.350.000.000	1.253.900.390	92,88	99,17%
Efisiensi						99,18

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 9 program untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik yaitu:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran Rp10.565.238.000,- dan terealisasi Rp9.777.798.315,- atau sebesar 99,17%.
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan anggaran Rp7.009.507.000,- dan terealisasi Rp6.705.952.106,- atau sebesar 99,15%.
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan anggaran Rp14.779.478.277,- dan terealisasi Rp13.282.231.771,- atau sebesar 99,20%.
- 4) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan anggaran Rp4.991.613.338,- dan terealisasi Rp4.403.251.450,- atau sebesar 99,21%.
- 5) Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran Rp28.295.692.000,- dan terealisasi Rp25.864.406.453,- atau sebesar 99,18%.
- 6) Program Penataan Bangunan Gedung dengan anggaran Rp848.765.000,- dan terealisasi Rp743.567.000,- atau sebesar 99,22%.
- 7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan anggaran Rp769.663.268,- dan terealisasi Rp767.743.268,- atau sebesar 99,11%.
- 8) Program Pengembangan Jasa Kontruksi dengan anggaran Rp232.464.000,- dan terealisasi Rp138.468.500,- atau sebesar 99,47%.



- 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggaran Rp1.350.000.000,- dan terealisasi Rp1.253.900.390,- atau sebesar 99,17%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik sebesar 99,18%.

g. Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik, terdapat beberapa program yang mendukung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota.
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat.
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan sasaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat.
- 4) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan sasaran kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Kota.
- 5) Program Penyelenggaraan Jalan dengan sasaran penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, updating kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- 6) Program Penataan Bangunan Gedung dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi teknis IMB dan SLF.
- 7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya.
- 8) Program Pengembangan Jasa Kontruksi dengan sasaran kegiatan penyelenggaran pelatihan tenaga



terampil konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, dan Penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional.

- 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang diarahkan pada kegiatan penataan ruang dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah.

12. Tujuan/Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

Tujuan/Sasaran Strategis 12 (dua belas) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 12 (dua belas) adalah:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 12 (dua belas) adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

- Indeks Kualitas Air
- Indeks Kualitas udara
- Indeks Kualitas Lahan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

➤ **Dinas Lingkungan Hidup**

2. Rasio konektivitas kota

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 12 (dua belas) adalah meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan Angkatan jalan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD):

- Rasio Ijin Trayek
- Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

➤ **Dinas Perhubungan**

3. Kinerja lalu lintas kota

Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 12 (dua belas) adalah Rasio meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan Angkatan jalan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase Kepemilikan KIR Angkatan Umum.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 12 (Dua belas) adalah:

➤ **Dinas Perhubungan**

12.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan formulasi sebagai berikut :

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 adalah:

Tabel 3.50
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023

Indikator Kinerja (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup	Nilai	56,2	56,4	56,6	56,8	56,8
Realisasi						
Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup	Nilai	58,37	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup	%	103,86	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : Dinas LH

Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 sebesar 56,2% dan terealisasi 58,37% sehingga capaian kinerjanya adalah 103,86% dengan kategori Sangat Baik.
- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**
Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 adalah 58,37% dan capaian kinerjanya adalah 103,86%. Apabila dibandingkan dengan realisasi dengan akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 61,34%, tahun 2023 ini mengalami penurunan dikarenakan penurunan target pada RPD tahun 2023.
- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).**
Target realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 adalah 58,37% sedangkan target akhir RPD tahun 2026 adalah 56,8% maka ditahun pertama ini sudah melebihi target yang ditetapkan.
- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

Target nasional Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,48 sedangkan realisasi kinerja IKLH Kota salatiga tahun 2023 sebesar 58,37% yang berarti masih di bawah target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu dengan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup melalui regulasi dan peningkatan sarana prasarana penanganan dan pengangkutan sampah.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.51
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	103,86 %	Perencanaan Lingkungan Hidup	3.383.323.267	3.254.065.902	86,90%	99,16%
		Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	509.434.512	487.762.450	95,75%	99,08%
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	6.231.182.837	6.062.367.388	97,29%	99,06%
		Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	95.900.000	53.882.488	56,19%	99,46%
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Lingkungan Hidup (PPLH)	46.969.000	37.510.500	80,33%	99,23%
		Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Untuk Masyarakat	97.760.000	57.772.750	59,10%	99,43%
		Pengelolaan Persampahan	3.383.323.267	3.254.065.902	96,18%	99,07%
Efisiensi						99,08%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 7 program untuk mendukung capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu:

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp3.383.323.267,- dan terealisasi Rp3.254.065.902,- atau sebesar 86,90%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,16%.



- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp509.434.512,- dan terealisasi Rp487.762.450,- atau sebesar 95,75%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,08%.
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan anggaran Rp6.231.182.837,- dan terealisasi Rp6.062.367.388,- atau sebesar 97,29%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,06%.
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan anggaran Rp95.900.000,- dan terealisasi Rp53.882.488,- atau sebesar 56,19%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,46%.
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan anggaran Rp46.969.000,- dan terealisasi Rp37.510.500,- atau sebesar 80,33%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,23%.
- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Masyarakat dengan anggaran Rp97.760.000,- dan terealisasi Rp57.772.750,- atau sebesar 59,10%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,45%.
- 7) Program Pengelolaan Persampahan dengan anggaran Rp3.383.323.267,- dan terealisasi Rp3.254.065.902,- atau sebesar 96,18%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks KLH sebesar 99,08%.

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Dalam upaya meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa program yang mendukung antara lain sebagai berikut:

• Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan indikator kinerja berupa dokumen IKPLHD dan dokumen KLHS.
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan sasaran kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan sasaran kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati.
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan

- Beracun (Limbah B3) dengan sasaran kegiatan pengumpulan limbah (B3).
- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah.
 - 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Masyarakat dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
 - 7) Program Pengelolaan Persampahan dengan sasaran kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaan serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

12.2 Rasio Konektivitas Kota

Rasio Konektivitas Kota adalah sebuah ukuran yang menggambarkan sejauh mana sebuah kota terkoneksi baik. Ini mencakup aspek-aspek seperti infrastruktur transportasi, aksesibilitas, dan layanan publik yang tersedia bagi penduduk. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Rasio Konektivitas Kota dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan formulasi sebagai berikut :

Rasio Konektivitas Kota
$$= \frac{\text{Jumlah Trayek yang Dilayani} \times \text{Bobot Trayek}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek}} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) pada Rasio Konektivitas Kota:

Tabel 3.52
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rasio Konektivitas Kota

Indikator Kinerja (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Rasio Konektivitas Kota	%	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Realisasi						
Rasio Konektivitas Kota	%	0,81	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Rasio Konektivitas Kota	%	114,08	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : Dinas Perhubungan



Indikator kinerja Rasio Konektivitas Kota merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Rasio Konektivitas Kota dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Rasio konektivitas kota tahun 2023 sebesar 0,71% dan terealisasi sebesar 0,81% sehingga capaian kinerjanya adalah 114,08% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi Rasio konektivitas kota tahun 2023 sebesar 0,81% dan capaian kinerjanya sebesar 114,08% indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator baru pada RPD tahun 2023

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Realisasi Rasio konektivitas kota tahun 2023 sebesar 0,81% apabila dibandingkan dengan terget akhir RPD Tahun 2026 sebesar 0,71% maka pada tahun pertama, indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada target nasional untuk indikator Rasio Konektivitas Kota.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Keberhasilan pada indikator Rasio konektivitas kota ini disebabkan sebagian besar jumlah kebutuhan trayek terpenuhi dengan kondisi trayek yang dilayani tersebut mempunyai bobot trayek yang bagus yaitu berada di frekuensi tinggi sebanyak lebih dari lima kali dalam seminggu

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.53
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator
Rasio Konektivitas Kota

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Rasio konektivitas kota	114,08 %	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6.978.824.266	6.219.048.782	89,11%	99,22%
Efisiensi						99,22%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 1 program untuk mendukung capaian indikator Rasio konektivitas kota yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan anggaran Rp6.978.824.266,- dan terealisasi Rp6.219.048.782,- atau sebesar 89,11%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,22%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Rasio konektivitas kota tahun 2023 sebesar 99,22%

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dalam upaya meningkatkan Rasio Konektivitas Kota tahun 2023, program yang mendukung pada Dinas Perhubungan adalah:

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sasaran kegiatan penetapan rencana induk dan jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, dan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan.

12.3 Kinerja Lalu Lintas Kota

Kinerja lalu lintas kota mencerminkan seberapa efisien dan lancarnya mobilitas kendaraan dan orang pada kota tersebut. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Kinerja Lalu Lintas Kota dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan formulasi sebagai berikut :

$$Kinerja\ Lalu\ Lintas\ Kota = \frac{V/C\ Rasio\ Ruas\ Jalan}{Jumlah\ Jalan\ yang\ Disurvei} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) pada Kinerja Lalu Lintas Kota:

Tabel 3.54
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kinerja Lalu Lintas Kota

Indikator Kinerja (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Kinerja Lalu Lintas Kota	%	0,35	0,4	0,45	0,5	0,5
Realisasi						
Kinerja Lalu Lintas Kota	%	0,39	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Kinerja Lalu Lintas Kota	%	111,43	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : Dinas Perhubungan



Indikator Kinerja Lalu Lintas Kota merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Kinerja Lalu Lintas Kota dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Kinerja lalu lintas kota tahun 2023 sebesar 0,35% dan terealisasi sebesar 0,39% sehingga capaian kinerjanya adalah 111,43% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi Kinerja lalu lintas kota tahun 2023 sebesar 0,39% dan capaian kinerjanya sebesar 111,43% indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator baru dalam RPD tahun 2023.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Realisasi Kinerja lalu lintas kota tahun 2023 sebesar 0,39% apabila dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 0,5% maka realisasi pada tahun pertama ini sudah melebihi target yang ditetapkan.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk indikator Kinerja lalu lintas kota

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Penyebab keberhasilan pada indikator Kinerja lalu lintas kota ini dikarenakan peningkatan layanan perhubungan dengan perbaikan sarana dan prasarana transportasi.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.55
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Kinerja Lalu Lintas Kota

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Kinerja lalu lintas kota	111,43 %	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	6.978.824.266	6.219.048.782	89,11%	99,20%
Efisiensi						99,20%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 1 program untuk mendukung capaian indikator Kinerja lalu lintas kota yaitu:



- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan anggaran Rp6.978.824.266,- dan terealisasi Rp6.219.048.782,- atau sebesar 89,11%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,20%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Rasio konektivitas kota tahun 2023 sebesar 99,20%

g. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dalam upaya meningkatkan Kinerja lalu lintas kota tahun 2023, terdapat program yang mendukung pada Dinas Perhubungan yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sasaran kegiatan penetapan rencana induk dan jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, dan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan.

13. Tujuan/Sasaran Strategis: Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup

Tujuan/Sasaran strategis 13 (tiga belas) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Persentase Rumah yang didukung oleh PSU
Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 13 (tiga belas) adalah Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.
2. Pemukiman yang tertata
Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis 13 (tiga belas) adalah
 - a. Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase lingkungan permukiman kumuh.
 - b. Meningkatnya pengelolaan pertanahan dengan variabel Indikator Kinerja Daerah (IKD): Persentase luas lahan bersertifikat dan Penyesalan kasus tanah negara.

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran Strategis 13 (tiga belas) adalah:

- **Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

13.1 Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU

Persentase rumah yang didukung oleh PSU (Penyediaan Sistem Utilitas) mengacu pada proporsi rumah atau bangunan di

suatu kawasan yang menerima layanan utilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi dari penyedia layanan utilitas yang disediakan oleh pemerintah atau pihak lainnya. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU

$$= \frac{\text{Jumlah rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah di Kota Salatiga}} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian kinerja Indikator kinerja Utama (IKU) Persentase rumah yang didukung oleh PSU:

Tabel 3.56

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU

Indikator Kinerja (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Persentase rumah yang didukung oleh PSU	%	10,2	10,37	10,73	11	11
Realisasi						
Persentase rumah yang didukung oleh PSU	%	12,47	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Persentase rumah yang didukung oleh PSU	%	122,25	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : Dinas PKP

Indikator kinerja Persentase rumah yang didukung oleh PSU merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Persentase rumah yang didukung oleh PSU dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Persentase rumah yang didukung oleh PSU tahun 2023 adalah sebesar 10,2% dan terealisasi sebesar 12,47%, sehingga capaian kinerjanya adalah 122,25% dengan kategori Sangat Baik.
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase rumah yang didukung oleh PSU tahun 2023 sebesar 12,47% dan capaian kinerjanya sebesar 122,25%, indikator ini tidak

dapat diperbandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan indikator baru dalam RPD tahun 2023.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Realisasi Persentase rumah yang didukung oleh PSU tahun 2023 sebesar 12,47% bila dibandingkan dengan target RPD tahun 2023 sebesar 10,2% dan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 11% dengan demikian target RPD tahun pertama untuk indikator Persentase rumah yang didukung oleh PSU sudah melebihi target yang ditetapkan

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk Persentase rumah yang didukung oleh PSU

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan kinerja Persentase rumah yang didukung oleh PSU ini diantaranya dengan Pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan serta penyediaan infrastruktur yang sesuai

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.57
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Persentase rumah yang didukung oleh PSU	122,25 %	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	15.000.000	3.688.500	24,59%	99,80%
		Pengelolaan Izin Membuka Tanah	241.662.000	172.677.990	71,45%	99,42%
		Penatagunaan Tanah	1.335.107.600	1.251.968.000	93,77%	99,23%
		Pengembangan Perumahan	739.478.000	705.150.960	95,36%	99,22%
		Kawasan Permukiman	11.093.851.001	9.868.619.346	88,96%	99,27%
		Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	9.172.456.147	9.041.785.281	98,58%	99,19%
Efisiensi						99,24%

Sumber : Data yang diolah



Terdapat 6 program untuk mendukung capaian indikator Persentase rumah yang didukung oleh PSU yaitu:

- 1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan anggaran Rp15.000.000,- dan terealisasi Rp3.688.500,- atau sebesar 24,59% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,80%
- 2) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan anggaran Rp241.662.000,- dan terealisasi Rp172.677.990,- atau sebesar 71,45% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,42%
- 3) Program Penatagunaan Tanah dengan anggaran Rp1.335.107.600,- dan terealisasi Rp1.251.968.000,- atau sebesar 93,77% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,23%
- 4) Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp739.478.000,- dan terealisasi Rp705.150.960,- atau sebesar 95,36% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,22%
- 5) Program Kawasan Permukiman dengan anggaran Rp11.093.851.001,- dan terealisasi Rp9.868.619.346,- atau sebesar 88,96% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,27%
- 6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) dengan anggaran Rp9.172.456.147,- dan terealisasi Rp9.041.785.281,- atau sebesar 98,58% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,19%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU 99,24%.

g. Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya persentase rumah yang didukung oleh PSU, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- 1) Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus serta Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
- 2) Program Kawasan Permukiman yang diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
- 3) Program Penatagunaan Tanah dengan sasaran kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah.

- 4) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan sasaran kegiatan penerbitan izin membuka tanah yang dilakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin membuka tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah negara.

5) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan sasaran kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan.

6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk menunjang fungsi hunian umum perumahan.

13.2 Pemukiman Yang Tertata

Pemukiman yang tertata merujuk pada suatu wilayah permukiman yang direncanakan dan diatur secara terorganisir dengan infrastruktur yang baik serta pemisahan fungsi lahan yang jelas. Indikator ini sering digunakan dalam konteks perencanaan perkotaan untuk menggambarkan suatu kawasan yang memiliki tata ruang yang teratur dan memadai. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Pemukiman yang Tertata dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan formulasi sebagai berikut :

Pemukiman yang Tertata

$$= \frac{\text{Luasan Permukiman yang sudah di tata}}{\text{Luas Permukiman se Kota Salatiga}} \times 100\%$$

Berikut tabel capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Pemukiman yang tertata:

Tabel 3.58
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemukiman yang tertata

Indikator Kinerja (IKU)	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir RPD 2026
Target						
Pemukiman yang tertata	%	6,26	6,34	6,42	6,49	6,49
Realisasi						
Pemukiman yang tertata	%	6,34	-	-	-	-
Capaian Kinerja						
Pemukiman yang tertata	%	101,28	-	-	-	-
Kategori		Sangat Baik				

Sumber : Dinas PKP

Indikator kinerja Pemukiman yang tertata merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Pemukiman yang tertata dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:



b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Target Pemukiman yang tertata tahun 2023 adalah 6,26% dan realisasinya adalah 6,34%. Sehingga capaian kinerja pada indikator Pemukiman yang tertata sebesar 101,28% dengan kategori Sangat Baik.

c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi kinerja Pemukiman yang tertata tahun 2023 adalah 6,34% sedangkan capain kinerjanya adalah 101,28% indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan indikator baru dalam RPD tahun 2023.

d. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Realisasi kinerja Pemukiman yang tertata tahun 2023 adalah 6,34% sedangkan target RPD tahun 2023 adalah 6,26% sedangkan target akhir RPD tahun 2026 adalah 6,49% dengan demikian ditahun pertama ini sudah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

e. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tidak ada Standar Nasional pada indikator Pemukiman yang tertata.

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan indikator Pemukiman yang tertata diantaranya dengan pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.59
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja Pemukiman yang Tertata

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
Pemukiman yang tertata	101,28 %	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	15.000.000	3.688.500	24,59%	99,76%
		Pengelolaan Izin Membuka Tanah	241.662.000	172.677.990	71,45%	99,29%
		Penatagunaan Tanah	1.335.107.600	1.251.968.000	93,77%	99,07%
		Pengembangan Perumahan	739.478.000	705.150.960	95,36%	99,06%



Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Capaian	
		Kawasan Permukiman	11.093.851.001	9.868.619.346	88,96%	99,12%
		Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	9.172.456.147	9.041.785.281	98,58%	99,03%
Efisiensi						99,08%

Sumber : Data yang diolah

Terdapat 6 program untuk mendukung capaian indikator Pemukiman yang tertata yaitu:

- 1) Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp739.478.000,- dan terealisasi Rp9.868.619.346,- atau sebesar 95,36%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,06%.
- 2) Program Kawasan Permukiman dengan anggaran Rp11.093.851.000,- dan terealisasi Rp78.920.500,- atau sebesar 88,96%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,12%.
- 3) Program Penatagunaan Tanah dengan anggaran Rp1.335.107.600,- dan terealisasi Rp1.251.968.000,- atau sebesar 93,77%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,07%.
- 4) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan anggaran Rp241.662.000,- dan terealisasi Rp172.677.990,- atau sebesar 71,45%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,29%.
- 5) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan anggaran Rp15.000.000,- dan terealisasi Rp3.688.500,- atau sebesar 24,59%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,76%.
- 6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan anggaran Rp9.172.456.147,- dan terealisasi Rp9.041.785.281,- atau sebesar 98,58% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 99,03%.

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Pemukiman yang tertata 99,08%.

h. Analisis program yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program kegiatan yang mendukung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- 1) Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah



- husus serta Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
- 2) Program Kawasan Permukiman yang diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
 - 3) Program Penatagunaan Tanah dengan sasaran kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah.
 - 4) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan sasaran kegiatan penerbitan izin membuka tanah yang dilakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin membuka tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah negara.
 - 5) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan sasaran kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan.
 - 6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk menunjang fungsi hunian umum perumahan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian integral dari seluruh proses dan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang didasarkan atas prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah.

Sebagai rencana pengelolaan keuangan tahunan daerah, APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, disusun dengan pendekatan kinerja dan mengutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.

Usulan program kegiatan dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya melalui rasionalisasi dan sinkronisasi program. Penilaian kewajaran dan kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan



program dan kegiatan yang diusulkan, dapat dilihat dari pelaksanaan program yang sudah diselesaikan oleh perangkat daerah dengan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan dalam capaian kinerja yang direncanakan.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Target Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp958.039.688.000,- dan terealisasi sebesar Rp987.241.298.498,- atau 103,05%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD saat ini masih relatif rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan. Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi daerah adalah besarnya pendapatan daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan tahun 2023 mencapai Rp284.536.299.558,- atau 113,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp250.852.619.000,-. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 yang mencapai Rp240.959.878.632,- maka realisasi tahun 2023 naik sebesar Rp43.576.420.926,- atau 18,08%.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.60
Perkembangan PAD Kota Salatiga Tahun 2012 - 2023

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pendapatan Daerah (Realisasi)	Proporsi %
2013	87.723.650.000	106.100.450.499	603.204.201.915	17,59%
2014	114.781.747.000	165.747.645.080	727.619.868.812	22,78%
2015	143.835.170.000	167.010.555.173	673.865.039.498	24,78%
2016	172.775.326.000	203.768.652.017	879.784.189.262	23,16%
2017	188.391.649.000	218.453.587.980	880.956.308.959	24,80%
2018	209.772.712.000	208.926.057.032	889.992.411.250	23,48%
2019	221.089.796.000	236.086.218.372	928.019.899.150	25,44%
2020	197.768.282.000	219.553.318.240	890.223.683.933	24,66%
2021	237.406.216.000	280.701.251.597	946.191.087.524	29,67%
2022	218.644.038.938	240.959.878.632	918.353.779.916	26,24%
2023	250.852.619.000	284.536.299.558	987.241.298.498	28,82%

Sumber : BPKPD (diolah)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing



mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.083.753.111.946,- dan terealisasi sebesar Rp1.014.747.383.243,- atau sebesar 93,63%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp932.071.471.274,- maka mengalami kenaikan sebesar Rp82.675.911.969,- atau sebesar 8,87%.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp127.213.423.946,- dan realisasinya sebesar Rp127.159.087.219,- atau mencapai 99,96%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp142.431.115.304,-, maka mengalami penurunan sebesar Rp15.272.028.085,- atau sebesar 12,01%.

Pengeluaran pembiayaan tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,- dan realisasinya mencapai Rp1.500.000.000,- atau 100,00%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000,-, maka realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

Pembiayaan Netto tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp125.713.423.946,- dan realisasinya sebesar Rp125.659.087.219,- atau 99,96%. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp140.931.115.304,- maka realisasi pembiayaan netto tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp15.272.028.085,- atau 10,84%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp98.153.002.474,- Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp127.213.423.946,- maka realisasi SILPA Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp29.060.421.472,- atau 22,84%.



BAB IV
PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kota Salatiga Tahun 2023, berikut hasil capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023:

Tabel 4.1
Data Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Rata Rata Lama Sekolah	10,67 Tahun	11,24 Tahun	105,34%	Sangat Baik
		Harapan Lama Sekolah	15,43 Tahun	15,44 Tahun	100,06%	Sangat Baik
		Indek Literasi Masyarakat	Nilai 52,06	Nilai 63,14	121,28%	Sangat Baik
2	Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	19%	32,69%	172,05%	Sangat Baik
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	15 Medali	39 Medali	260%	Sangat Baik
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	20,59%	23,23%	112,82%	Sangat Baik
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Angka Harapan Hidup	77,67 Tahun	77,93 Tahun	100,33%	Sangat Baik
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,34%	1,21%	109,7%	Sangat Baik
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	4,71%	5,34%	113,38%	Sangat Baik
		Pendapatan per kapita	54,11 Juta	54,89 Juta	101,44%	Sangat Baik
6	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan Kerjasama antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi	10%	52,17%	521,7%	Sangat Baik
		Tingkat pengangguran terbuka	6,76%	4,57%	132,40%	Baik
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,71%	72,09%	103,41%	Sangat Baik
7	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	94,5%	94,56%	100,06%	Sangat Baik
		Pola Pangan Harapan	92,2%	92,4%	100,22%	Sangat Baik
		Persentase Peminat Transmigrasi	3,3%	25%	757,58%	Sangat Baik



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Kategori
8	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Score capaian KLA	Nilai 615	611	99,35%	Baik
		IDG	Nilai 80	Nilai 79,48	99,35%	Baik
		IPG	Nilai 95	Nilai 95,45	100,47%	Sangat Baik
9	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai 65,5	Nilai 64,93	99,13%	Baik
10	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	100%	100%	100%	Baik
		Penanggulangan Potensi Konflik	100%	100%	100%	Baik
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana	Nilai 3,84	Nilai 5,6	145,83%	Sangat Baik
11	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik	52,5%	58,82%	112,04%	Sangat Baik
12	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 56,2	Nilai 58,37	103,86%	Sangat Baik
		Rasio konektivitas kota	0,71%	0,81%	114,08%	Sangat Baik
		Kinerja Lalu Lintas Kota	0,35%	0,39%	111,43%	Sangat Baik
13	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan pemukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Persentase rumah yang didukung oleh PSU	10,2%	12,47%	122,25%	Sangat Baik
		Pemukiman yang tertata	6,26%	6,34%	101,28%	Sangat Baik

Sumber : Data yang diolah

Hasil pengukuran kinerja terhadap 13 sasaran dengan 29 indikator kinerja utama berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga tahun 2023 disimpulkan bahwa **26** (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama atau **89,66%** dikategorikan **Sangat Baik**, dan **3** (tiga) Indikator Kinerja Utama atau **10,34%** dikategorikan **Baik**.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pencapaian 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama, telah dianggarkan melalui APBD Kota Salatiga sebesar Rp1.083.753.111.946,- dengan realisasi sebesar Rp1.014.747.383.243,- atau sebesar 93,63%.

Berdasarkan data diatas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian 29 indikator kinerja Pemerintah Kota Salatiga sebesar 99,25%.



Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Salatiga tahun 2032. Semoga LKjIP Kota Salatiga Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

